

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

bangga
melayani
bangsa



L
K
I
P

2
0
2
4

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN

**DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN
RUANG KOTA DUMAI**

LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKIP)
TAHUN 2024



DINAS PERTANAHAN DAN
PENATAAN RUANG
PEMERINTAH KOTA DUMAI

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR LAMPIRAN.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Kedudukan, Tugas Pokok dan fungsi.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	7
1.4 Isu-isu Strategis.....	7
1.5 Cascading Kinerja.....	8
1.6 Peta Proses Bisnis.....	9
1.7 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024.....	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG KOTA DUMAI.....	12
2.1 Rencana Strategis.....	12
2.2 Tujuan dan sasaran.....	14
2.3 Kebijakan, Strategi dan Program.....	17
2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG KOTA DUMAI.....	23
A Capaian Kinerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai...	23
3.1 Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024.....	25
3.2 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.....	28
3.3 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target renstra.....	33
3.4 Perbandingan realisasi kinerja dengan standar nasional.....	36

3.5	Analisa penyebab Keberhasilan/ kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif solusi.....	37
3.6	Analisis Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.....	42
3.7	Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.....	45
3.8	Prestasi dan Penghargaan.....	47
B	Realisasi Anggaran.....	47
BAB IV PENUTUP.....		54

DAFTAR LAMPIRAN

1. Matrik Rencana Strategis Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai Tahun 2021-2026;
2. Rencana Kinerja Tahun 2024 Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai;
3. Perjanjian Kinerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai Tahun 2024;
4. Perubahan Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai Tahun 2024 beserta lampiran perubahan;
5. Pengukuran Kinerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai Tahun 2024;
6. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Realisasi Belanja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai Tahun 2024;

DAFTAR TABEL

Tabel i	Perjanjian Kinerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai Pada Tahun 2024.....	xvii
Tabel ii	Program Kerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai.....	xvii
Tabel ii	Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang tahun Kota Dumai 2024.....	xviii
Tabel iv	Capaian Kinerja berdasarkan target dan realisasi tahun 2024.....	iv
Tabel v	Pencapaian Kinerja dan Anggaran Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai Tahun 2024.....	xxi
Tabel vi	Efisiensi penggunaan Sumber Daya Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai Tahun 2024.....	xxiii
Tabel 1-1	Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.....	10
Tabel 2-1	Tujuan dan Sasaran RPJMD dengan Tujuan dan Sasaran Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai Tahun 2021-2026..	16
Tabel 2-2	Strategi dan Kebijakan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Tahun 2024.....	17
Tabel 2-3	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai.....	19
Tabel 2-4	Perjanjian Kinerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai Tahun 2024.....	20
Tabel 2-5	Program kerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai.....	21
Tabel 2-6	Program kerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang.....	22
Tabel 3-1	Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	24
Tabel 3-2	Atribut Capaian Indikator Kinerja.....	25
Tabel 3-3	Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2024 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.....	29
Tabel 3-4	Perbandingan realisasi Kinerja Dengan Standar Nasional.....	36
Tabel 3-5	Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.....	43

Tabel 3-6	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	45
Tabel 3-7	Prestasi dan Penghargaan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai Tahun 2024.....	47
Tabel 3-8	Ringkasan Anggaran dan realisasi Tahun 2024.....	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1-1	Struktur Organisasi Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai.....	6
Gambar 1-2	Cascading Kinerja.....	8
Gambar 1-3	Peta Proses Bisnis Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai.....	9
Gambar 2-1	Misi Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai.....	13

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai Tahun 2024 dapat tersusun dengan baik. Sekalipun dalam penyusunannya kami berusaha semaksimal mungkin namun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini masih memiliki banyak kekurangan, dan kami akan berusaha lebih untuk memperbaiki segala kekurangan.

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai ini merupakan perwujudan dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan berpedoman pada Permenpan dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini dimaksudkan juga untuk memudahkan organisasi mengetahui dan mengevaluasi pelaksanaan kinerja, tugas-tugas pokok dan fungsinya pada kewenangan urusan di bidang Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai. Efisiensi dalam penggunaan anggaran sesuai dengan APBD Kota Dumai sebagai penunjang kinerja kegiatan yang berada di bawah kendali Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai.

Namun kami sadari bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan. Sehubungan dengan hal tersebut kami sangat mengharapkan masukan, saran, pendapat, pertimbangan maupun kritikan yang bersifat membangun demi penyempurnaan Laporan Kinerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai pada tahun mendatang.

Demikian penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai, semoga Laporan Kinerja ini dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebagai acuan/evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pembangunan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai khususnya dan Kota Dumai pada umumnya di tahun berikutnya.

Dumai, 14 Januari 2025
KEPALA DINAS PERTANAHAN DAN
PENATAAN RUANG

MUHAMMAD MUFARIZAL, S.T., M.IP.

Pembina / IV a

NIP.19860216 201001 1 014

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai merupakan salah satu Perangkat Daerah Kota Dumai yang dibentuk berdasarkan Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan mempunyai tugas yaitu membantu Wali kota Dumai melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

Sebagaimana Peraturan Wali kota Dumai Nomor 80 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai, maka sebagai unsur teknis, Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali kota melalui Sekretaris Daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai menjalankan fungsi:

- a. Perencanaan dan perumusan kebijakan teknis dibidang pertanahan, tata ruang dan cipta karya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pertanahan, tata ruang dan cipta karya;
- c. Penyusunan dan sosialisasi dokumen rencana umum, rencana rinci, rencana aksi, rencana kawasan strategis pertanahan, tata ruang dan cipta karya;
- d. Pembinaan dan pelaksanaan urusan pertanahan, tata ruang dan cipta karya;
- e. Pelaksanaan penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal bidang pertanahan, tata ruang dan cipta karya;

- f. Penyelenggaraan urusan penatausahaan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang sesuai dengan kewenangannya;
- g. Pelaksanaan kebijaksanaan dan strategi penataan ruang dan penataan daerah;
- h. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional bidang pertanahan, tata ruang dan cipta karya;
- i. Pengendalian serta koordinasi pertanahan, tata ruang dan cipta karya;
- j. Pembagian tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing;
- k. Pemberian petunjuk kepada bawahan dengan cara tertulis atau secara lisan agar pelaksanaan tugas efisien dan efektif;
- l. Pengaturan pelaksanaan tugas berdasarkan prioritas agar tugas dapat diselesaikan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan;
- m. Pelaksanaan fasilitasi tugas dengan cara konsultasi, kunjungan kerja, sosialisasi dan bimbingan teknis;
- n. Penyusunan sistem informasi dan komunikasi pertanahan, tata ruang dan cipta karya;
- o. Pengevaluasian tugas berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan pelaksanaan tugas lebih lanjut;
- p. Pelaporan pelaksanaan tugas kepada atasan secara lisan maupun tertulis; dan
- q. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan lingkup fungsinya.

Sejalan dengan tugas dan fungsi yang diemban, maka Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai melaksanakan MISI yang ke 3 RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026 yaitu **“Mewujudkan Infrastruktur Wilayah Yang Berkualitas”** dan SASARAN yang ke 3 yang merupakan Tujuan Srategis Organisasi yaitu **“Meningkatnya Infrastruktur Kota Dengan Indikator Keberhasilan”**

Penataan Ruang Kota Dumai 2022 – 2026 telah menetapkan 4 (empat) Tujuan dengan 6 (enam) Indikator Kinerja Utama yang menjadi tanggung jawab organisasi. Keberhasilan pencapaian tersebut harus diwujudkan dan menjadi tanggungjawab organisasi dan dicapai dalam kurun waktu 5 tahun.

Operasionalisasi Sasaran Strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai dalam menyukseskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai 2021 – 2026 Kota Dumai, adalah dengan ditetapkan 9 (sembilan) Program, 19 (sembilan Belas) Kegiatan dan 50 (lima puluh) Sub Kegiatan dalam Rencana Kinerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai Tahun 2024 antara lain:

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Sub Kegiatan:

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD.
- 3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD.
- 4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD.
- 5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD.
- 6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
- 7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

2. Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

Sub Kegiatan:

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.

3. Kegiatan: Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.

Sub Kegiatan:

- 1) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD.
- 2) Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD.
- 3) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.

4. Kegiatan: **Administrasi Umum Perangkat Daerah**

Sub Kegiatan:

- 1) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
- 2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
- 3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
- 4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.
- 5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- 6) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.

5. Kegiatan: **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.**

Sub Kegiatan:

- 1) Pengadaan Mebel.
- 2) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

6. Kegiatan: **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.**

Sub Kegiatan:

- 1) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

7. Kegiatan: **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.**

Sub Kegiatan:

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
- 2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

AIR MINUM

1. Kegiatan: Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota.

Sub Kegiatan:

- 1) Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan.
- 2) Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).
- 3) Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).
- 4) Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan.

III. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH

1. Kegiatan: Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota.

- 1) Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD).
- 2) Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD).
- 3) Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja.
- 4) Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja.
- 5) Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat.

IV. PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG

1. Kegiatan: Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung.

- 1) Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG.

- 2) Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan

Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota.

- 3) Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota.

V. PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA

1. Kegiatan: **Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota.**

- 1) Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota.

VI. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG

1. Kegiatan: **Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota.**

Sub Kegiatan:

- 1) Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota.
- 2) Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota.
- 3) Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang.

2. Kegiatan: **Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota.**

Sub Kegiatan:

- 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota.

3. Kegiatan: **Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota.**

Sub Kegiatan:

- 1) Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang.

4. Kegiatan: **Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**

Sub Kegiatan:

- 1) Pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiscal.
- 2) Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat.
- 3) Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang.

PERSAMPAHAN REGIONAL

1. Kegiatan: Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota.

Sub Kegiatan:

- 1) Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan.
- 2) Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS.
- 3) Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS.

VIII. PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN

1. Kegiatan: Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota.

Sub Kegiatan:

- 1) Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
- 2) Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

IX. PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH

1. Kegiatan: Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota.

Sub Kegiatan:

- 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah.

Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai pada Tahun 2024 mengalami 2 kali perubahan dikarenakan Perubahan Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.		Tingkat Pelayanan infrastruktur Dasar Bidang Sektor Cipta Karya	71,90%
	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Persentase penduduk yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%
	Terbangunnya Infrastruktur Persampahan Kota Dumai	Persentase Infrastruktur Persampahan	42,59%
	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Persentase penduduk berakses air minum	100%
	Terselenggaranya bangunan gedung dan sarana untuk kepentingan strategis Perkotaan	Persentase bangunan gedung dan sarana strategis kota yang diselenggarakan	45,00%
	Terbangunnya TPA/TPST/STA/TPS3R/TPS Kota Dumai	Persentase terbangunnya TPA/TPST/STA/TPS3R/TPS Kota Dumai	0%
2.		Persentase Kesesuaian Tata Ruang	50,26%
	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang dengan peruntukannya	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan peruntukannya	50,26%
3.		Persentase Penyelesaian Permasalahan Pertanahan Tahunan	60%
	Tercapainya tertib tata kelola Bidang Pertanahan yang baik	Persentase Penyelesaian permasalahan Pertanahan per Tahun	60%

Untuk mendukung pelaksanaan Sasaran Strategis PD sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024, maka Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai Tahun 2024 didukung dengan anggaran sebesar Rp. 169.846.613.191 (Seratus Enam Puluh

xvii

Sembilan Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Enam Juta Enam Ratus Tiga Belas Ribu Seratus Sembilan Puluh Satu Rupiah) untuk melaksanakan 9

(sembilan) Program Kerja antara lain :

Tabel ii

Program Kerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai

NO	PROGRAM	ANGGARAN	SUMBER DANA
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 4.781.267.430	APBD
2.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp. 27.584.000.050	APBD
3.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp. 2.945.663.000	APBD
4.	Program Penataan Bangunan Gedung	Rp. 80.112.254.189	APBD
5.	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Rp. 400.000.000	APBD
6.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp. 2.288.000.000	APBD
7.	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Rp. -	APBD
8.	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Rp. 200.000.000	APBD
9.	Program Penatagunaan Tanah	Rp. 400.000.000	APBD
J U M L A H		Rp. 118.711.184.669	APBD

Kemudian seiring dengan Perubahan Anggaran maka pada tanggal 23 September 2024 disusun Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel iii

Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai Tahun 2024

NO	PROGRAM	ANGGARAN	SUMBER DANA
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 9.753.759.324	APBD

xviii

2.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp. 41.931.295.447	APBD
----	--	--------------------	------

3.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Sistem Air Limbah	Rp.	1.955.048.000	APBD
4.	Program Penataan Bangunan Gedung	Rp.	112.704.319.220	APBD
5.	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Rp.	400.000.000	APBD
6.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp.	2.461.191.200	APBD
7.	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	RP.	-	APBD
8.	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Rp.	241.000.000	APBD
9.	Program Penatagunaan Tanah	Rp.	400.000.000	APBD
JUMLAH		RP.	169.846.613.191	APBD

Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai berkomitmen memberikan pernyataan keberhasilan atas komitmen kinerja yang ingin diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Hal tersebut dimaksudkan sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur serta penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian sasaran. Adapun Capaian Kinerja berdasarkan target dan realisasi tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel iv

Capaian Kinerja berdasarkan target dan realisasi tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian 2024	Sangat Berhasil	Berhasil	Cukup Berhasil	Tidak Berhasil
1.		Tingkat Pelayanan infrastruktur Dasar Bidang Sektor Cipta Karya	71,90%	48,20%	67,03%			✓	
	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Persentase Penduduk yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%	82,40%	82,40 %		✓		
	Terbangunnya infrastruktur persampahan Kota Dumai	Persentase Infrastruktur Persampahan	42,59%	50%	117,40%	✓			

xix

	Pemenuhan kebutuhan	Persentase penduduk	100%	15,38%	15,38%				✓
--	---------------------	---------------------	------	--------	--------	--	--	--	---

	pokok air minum sehari-hari	berakses air minum							
	Terselenggaranya bangunan gedung dan sarana untuk kepentingan strategis Perkotaan	Persentase bangunan gedung dan sarana strategis kota yang diselenggarakan	45,00%	45,00%	100%	✓			
	Terbangunnya TPA/TPST/TPS3R/TPS Kota Dumai	Persentase terbangunnya TPA/TPST/STA/TPS3R/TPS Kota Dumai	0%	0%	0%	-	-	-	-
2.		Persentase Kesesuaian Tata Ruang	50,26%	50,26%	100%	✓			
	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang dengan peruntukkannya	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan peruntukkannya	50,26%	50,26%	100%	✓			
3.		Persentase Penyelesaian Permasalahan pertanahan pertahun	60%	72%	120%	✓			
	Tercapainya tertib tata kelola Bidang Pertanahan yang baik	Penyelesaian kasus tanah Pemerintah, Pemda dan Masyarakat	60%	72%	120%	✓			

Berdasarkan akumulasi Capaian Indikator Kinerja Utama tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kinerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai selama tahun 2024 termasuk kategori Sangat Berhasil.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang pada Tahun 2024 didukung dengan anggaran sebesar Rp.169.846.613.191 (Seratus Enam Puluh Sembilan Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Enam Juta Enam Ratus Tiga Belas Ribuan Seratus Sembilan Puluh Satu Rupiah) bersumber dari APBD. Anggaran tersebut terdiri dari BELANJA OPERASI sebesar Rp. 33.435.211.434 (Tiga Puluh Tiga Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Lima Juta Dua Ratus Sebelas Ribuan Empat Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah) dan BELANJA MODAL sebesar Rp. 136.411.401.757 (Seratus Tiga Puluh Enam Miliar Empat Ratus Sebelas Juta Empat Ratus Satu Ribuan Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh xx

1. Belanja Operasi	:	Rp.	33.435.211.434
2. Belanja Modal	:	Rp.	136.411.401.757
Jumlah	:	Rp.	169.846.613.191

Sedangkan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai Tahun 2024 ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel v

Pencapaian Kinerja dan Anggaran Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai Tahun 2024

Tujuan / Sasaran / Program	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Penduduk Terlayani SPAM Jaringan Perpipaan	100%	15,38%	15,38%	41.931.295.447	23.921.609.378	59,75
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	100%	82,40%	82,40%	1.955.048.000	842.196.754	48,89
Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase Peningkatan Penataan Bangunan Gedung	45,00%	45,00%	100%	112.704.319.220	54.110.448.067	48,58
Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Persentase Penataan Bangunan dan lingkungan				400.000.000	16.920.000	4,23
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Penataan Ruang	50,26%	50,26%	100%	2.461.191.200	153.107.694	47,13

Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan	Persentase Pengembangan Sistem dan pengelolaan Persampahan	0	0	0	-	-	-
---	--	---	---	---	---	---	---

Regional	Regional						
Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	60%	72%	120%	241.000.000	159.071.538	66,00
Program Penatagunaan Tanah	Persentase Penatagunaan Tanah				400.000.000	186.071.488	46,94

Sebagaimana uraian tersebut di atas, Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai mengalokasikan Belanja Operasi dan Belanja Modal dalam APBD Tahun 2024. Adapun Efisiensi penggunaan Sumber Daya Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel vi

Efisiensi penggunaan Sumber Daya Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai Tahun 2024

NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN KINERJA (%)	PENYERAPAN ANGGARAN (%)	TINGKAT EFISIENSI	KETERANGAN
1.	Meningkatkan Pelayanan Infrastruktur Dasar Bidang Pertanahan dan Penataan Ruang	Tingkat Pelayanan infrastruktur Dasar Bidang Sektor Cipta Karya				
		Persentase Penduduk Berakses air minum	15,38%	59,75%	0,26	Kurang Efisien
		Persentase Infrastruktur Persampahan	117,40%	0	0	-
		Persentase Penduduk yang Berakses Sanitasi	82,40%	48,89%	1,68	Efisien
		Persentase bangunan gedung dan sarana strategis kota yang di Selenggarakan	100%	48,42%	2,06	Efisien
		Persentase terbangunnya TPA/TPST/TPS3R/TPS Kota Dumai	0%	0	0	-
2.	Terwujudnya Tata Ruang yang sesuai dengan Pemanfaatan Ruang	Persentase Kesesuaian Tata Ruang				
		Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Dengan Peruntukannya	100%	47,13%	2,12	Efisien
3.	Penyelesaian Permasalahan Pertanahan Pertahun	Persentase Penyelesaian Permasalahan pertanahan pertahun				
		Persentase Penyelesaian Permasalahan pertanahan pertahun	120%	54,11%	3,08	Efisien

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pada Indikator Kinerja Utama Persentase Penduduk yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik persentase capaian kinerja tahun 2024 (82,40%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2024 (48,89%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan sumber daya, termasuk dalam kategori **EFISIEN**.
2. Pada Indikator Kinerja Utama Persentase Persentase Infrastruktur Persampahan persentase capaian kinerja tahun 2024 (117,40%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2024 (0%). Pencapaian tersebut merupakan akumulasi dari tahun sebelumnya menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan sumber daya, termasuk dalam kategori **KURANG EFISIEN**.
3. Pada Indikator Kinerja Utama Persentase Penduduk Berakses air minum persentase capaian kinerja tahun 2024 (15,38%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2024 (59,75%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan sumber daya, termasuk dalam kategori **KURANG EFISIEN**.
4. Pada Indikator Kinerja Utama Persentase bangunan gedung dan sarana strategis kota yang diselenggarakan persentase capaian kinerja tahun 2024 (100%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2024 (48,42%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan sumber daya, termasuk dalam kategori **EFISIEN**.
5. Pada Indikator Kinerja Utama Persentase Persentase terbangunnya TPA/TPST/TPS3R/TPS Kota Dumai persentase capaian kinerja tahun 2024 (0%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2024 (0%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan sumber daya, termasuk dalam kategori **KURANG EFISIEN**.
6. Pada Indikator Kinerja Utama Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan peruntukannya persentase capaian kinerja tahun 2024 (100%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2024 (47,13%).

Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan sumber daya, termasuk dalam kategori **EFISIEN**.

7. Pada Indikator Kinerja Utama Persentase penyelesaian permasalahan pertanahan pertahun persentase capaian kinerja tahun 2024 (120%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2024 (54,11%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan sumber daya, termasuk dalam kategori **EFISIEN**.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (**LKIP**) adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Secara lengkap memuat laporan yang membandingkan perencanaan dan hasil. Menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD. Dalam pembuatan LKIP suatu instansi harus dapat menentukan besaran kinerja yang dihasilkan secara kuantitatif, yaitu besaran dalam jumlah satuan atau persentase.

Adapun informasi yang diharapkan dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), yaitu guna mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan sehingga beroperasi secara efisien, efektif, dan akuntabel terhadap masyarakat, sehingga menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan serta dapat menjaga terpeliharanya kepercayaan masyarakat.

Pertanggungjawaban kinerja dapat dicermati dengan menggunakan sistem dan prosedur yang sama, sebagaimana sistem dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan keputusan/petunjuk pelaksanaannya. Pertanggungjawaban kinerja dimulai dari pengukuran kinerja masing-masing kegiatan. Selanjutnya dari hasil pengukuran kinerja dilakukan prosedur evaluasi kinerja dimulai dari evaluasi kinerja, evaluasi kinerja program dan evaluasi kinerja kebijakan daerah.

Penyusunan LKIP juga merupakan bentuk pertanggungjawaban setiap Instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2016-2021;
4. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
5. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 80 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai;

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai Tahun 2024 dimaksudkan sebagai salah satu media untuk mengukur tingkat pelaksanaan akuntabilitas kinerja organisasi. Sebagai media hubungan kerja organisasi, laporan ini memuat informasi dan data yang telah diolah, meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan tanggung jawab (responsibilitas) atas pemberian mandat, delegasi wewenang ataupun amanah, terkait dengan berbagai sumberdaya yang digunakan untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

1.2 Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi

Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai dibentuk berdasarkan Peraturan Wali kota Dumai Nomor 80 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai yang menjadi kewenangan daerah. Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai menjalankan fungsi antara lain:

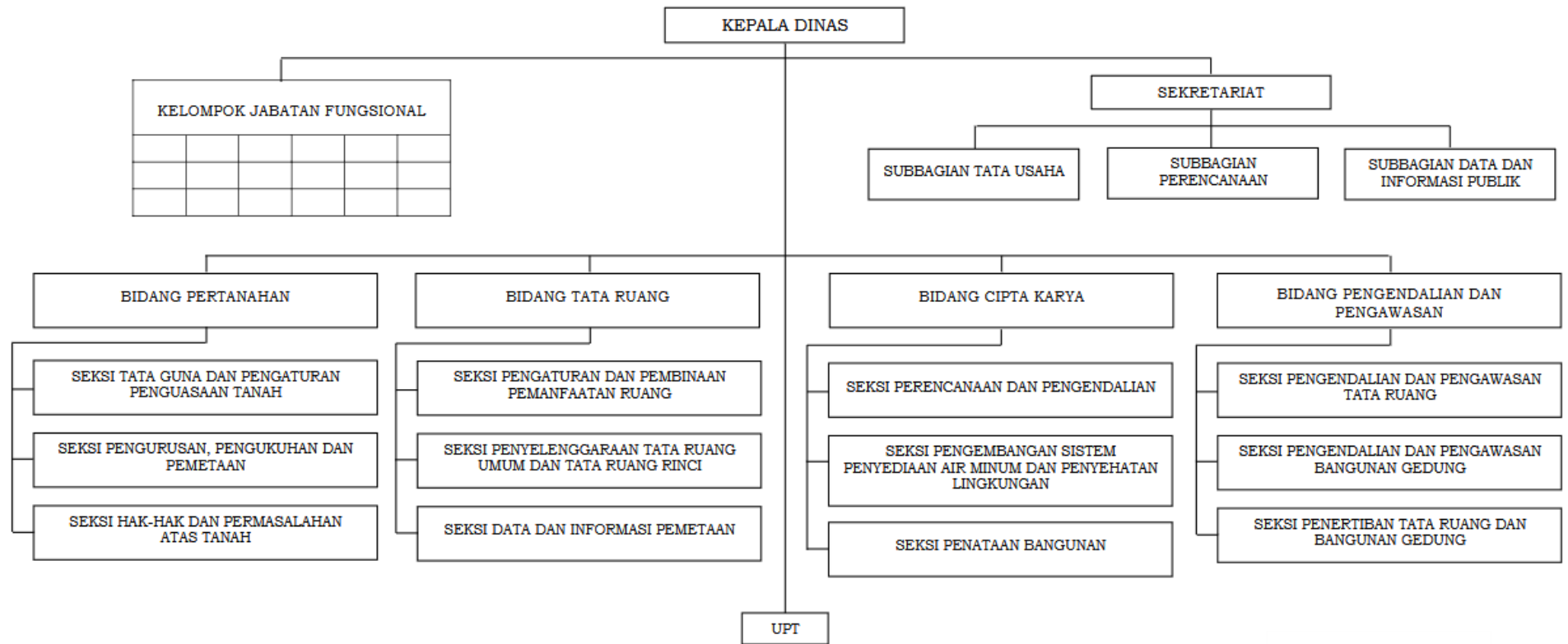
- a) Perencanaan dan perumusan kebijakan teknis dibidang pertanahan, tata ruang dan cipta karya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pertanahan, tata ruang dan cipta karya;
- c) Penyusunan dan sosialisasi dokumen rencana umum, rencana rinci, rencana aksi, rencana kawasan strategis pertanahan, tata ruang dan cipta karya;
- d) Pembinaan dan pelaksanaan urusan pertanahan, tata ruang dan cipta karya;
- e) Pelaksanaan penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal bidang pertanahan, tata ruang dan cipta karya;
- f) Penyelenggaraan urusan penatausahaan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang sesuai dengan kewenangannya;
- g) Pelaksanaan kebijaksanaan dan strategi penataan ruang dan penataan daerah;
- h) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional bidang pertanahan, tata ruang dan cipta karya;
- i) Pengendalian serta koordinasi pertanahan, tata ruang dan cipta karya;
- j) Pembagian tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing;
- k) Pemberian petunjuk kepada bawahan dengan cara tertulis atau secara lisan agar pelaksanaan tugas efisien dan efektif;
- l) Pengaturan pelaksanaan tugas berdasarkan prioritas agar tugas dapat diselesaikan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan;
- m) Pelaksanaan fasilitasi tugas dengan cara konsultasi, kunjungan kerja, sosialisasi dan bimbingan teknis;
- n) Penyusunan sistem informasi dan komunikasi pertanahan, tata ruang dan cipta karya;
- o) Pengevaluasian tugas berdasarkan informasi, data, laporan yang

- diterima untuk bahan penyempurnaan pelaksanaan tugas lebih lanjut;
- p) Pelaporan pelaksanaan tugas kepada atasan secara lisan maupun tertulis; dan
 - q) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan lingkup fungsinya.

Susunan organisasi Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1. Subbagian Tata Usaha;
 - 2. Subbagian Perencanaan; dan
 - 3. Subbagian Data dan Informasi Publik.
- c. Bidang Pertanahan, terdiri dari:
 - 1. Seksi Tata Guna dan Pengaturan Penguasaan Tanah;
 - 2. Seksi Pengurusan, Pengukuhan dan Pemetaan; dan
 - 3. Seksi Hak-hak dan Permasalahan atas Tanah.
- d. Bidang Tata Ruang, terdiri dari:
 - 1. Seksi Pengaturan dan Pembinaan Pemanfaatan Ruang;
 - 2. Seksi Penyelenggaraan Tata Ruang Umum dan Tata Ruang Rinci; dan
 - 3. Seksi Data dan Informasi Pemetaan.
- e. Bidang Cipta Karya, terdiri dari:
 - a. Seksi Perencanaan dan Pengendalian;
 - b. Seksi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan; dan
 - c. Seksi Penataan Bangunan
- f. Bidang Pengendalian dan Pengawasan, terdiri dari:
 - 1. Seksi Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang;
 - 2. Seksi Pengendalian dan Pengawasan Bangunan Gedung; dan
 - 3. Seksi Penertiban Tata Ruang dan Bangunan Gedung.
- g. UPT; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 1-1
Struktur Organisasi Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai



1.3 Maksud dan Tujuan

Kegiatan penyusunan dokumen laporan kinerja (LKIP) merupakan bentuk laporan capaian kinerja dinas dengan maksud sebagai pertanggungjawaban kerja selama tahun 2023, dengan tujuan :

- 1.3.1 Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
- 1.3.2 Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan dan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan;
- 1.3.3 Mengetahui tingkat keberhasilan dan kekurangan dalam pelaksanaan tugas dan tindaklanjut tahun berikutnya;
- 1.3.4 Merupakan media dalam upaya menyempurnakan kebijakan dalam rangka menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik.

1.4 Isu Strategis

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai tidak dapat terlepas dari isu-isu strategis yang melingkupinya. Perumusan isu–isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan, dan tantangan yang harus diminimalisir dampaknya dalam pelaksanaan pencapaian program.

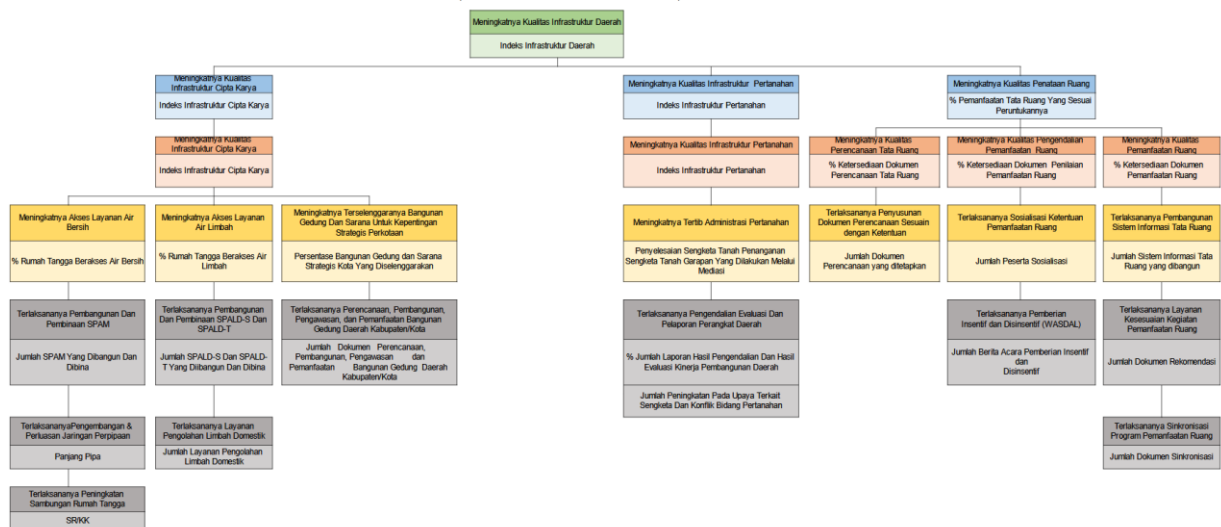
Isu strategis terkait dengan urusan Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai yang perlu ditangani sbb:

1. Belum optimalnya ketersediaan infrastruktur air bersih yang merata dan berkeadilan;
2. Produk tata ruang yang telah disusun belum mempunyai kekuatan hukum;
3. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam tertib penyelenggaraan penataan ruang;
4. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap penataan ruang, kualitas lingkungan dan pengelolaan sampah secara mandiri.

1.5 Cascading Kinerja

Cascading (penjabaran) kinerja merupakan proses penjabaran dan penyelarasan kinerja dan target kinerja secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah. Setiap Perangkat Daerah) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Wali kota Dumai Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:

Gambar 1-2
Cascading Kinerja

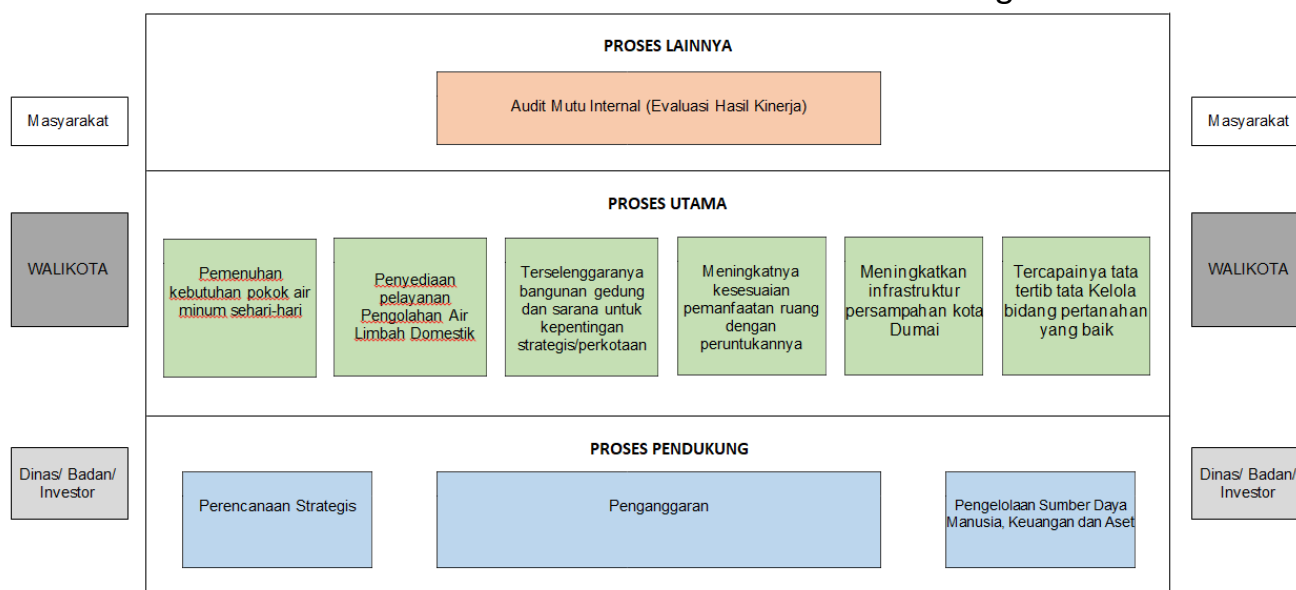


1.6 Peta Proses Bisnis

Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Peta proses Bisnis Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai sebagaimana skema berikut:

Gambar 1-3

Peta Proses Bisnis Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai



1.7 Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023

Tidak terdapat Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah pada Dinas Pertanahan dan Penataa Ruang Kota Dumai tahun 2023. Hal ini berdasarkan Perwako Nomor 80 pada tanggal 16 November 2023 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai.

Tabel 1-1

Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

No	Rekomendasi LHE 2023	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status/ Progres Penyelesaian	Aksi/ Eviden
1	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

BAB II
PERENCANAAN KINERJA
DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG KOTA DUMAI

2.1 Rencana Strategis

Rencana Strategis dihasilkan melalui suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan akhir tahun 2024 secara sistematis dan berkesinambungan dengan mempertimbangkan faktor-faktor antara lain: kondisi riil, potensi, hambatan, resiko serta pengembangan ke depan, sehingga tujuan dan sasaran Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai dapat mendukung perwujudan visi dan misi Kota Dumai. Proses tersebut telah menghasilkan Renstra Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai yang memuat tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sampai dengan akhir tahun 2024.

Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai membuat Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai. RENSTRA juga memberikan gambaran wujud pelayanan yang dapat diberikan sebagai bagian dari **Perjanjian Kerja Kepala Perangkat Daerah dengan Kepala Daerah.**

Perjanjian Kinerja yang dibuat setiap tahun berkaitan erat dengan pencapaian visi misi Kota Dumai, maka dokumen perencanaan strategis Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai harus dapat mengintegrasikan kepentingan dari berbagai unsur dan komponen yang ada serta dapat diimplementasikan dalam rencana kerja tahunan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai.

Visi Kota Dumai sebagaimana dijabarkan didalam Perubahan RPJMD Kota Dumai Tahun 2021 – 2026 adalah :

“Terwujudnya Dumai sebagai Kota Pelabuhan dan Industri yang Unggul dan Bertumpu Pada Budaya Melayu (Dumai Kota Idaman)”

Visi Kota Dumai berpedoman pada Visi Pembangunan Nasional yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024 yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, yang disebut sebagai nawacita kedua.

Visi ini juga berpedoman pada visi Pembangunan Provinsi Riau yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 yaitu “Terwujudnya Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat dan Unggul di Indonesia (Riau Bersatu)”.

Visi Kota Dumai ini menjadi landasan seluruh masyarakat Kota Dumai dalam melaksanakan pembangunan di Kota Dumai, dan juga merupakan target capaian yang menjadi keinginan dan cita-cita serta impian yang akan diwujudkan oleh Walikota dan Wakil Wali kota Dumai dalam 5 (Lima) tahun ke depan.

Sebagai Upaya mewujudkan Visi tersebut, ditetapkan 4 (empat) Misi Kota Dumai yang akan dilaksanakan, yaitu:

1. Mengembangkan Perekonomian Kota Yang Berdaya Saing Dan Bertumpu Pada Kepelabuhan Dan Industri
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berjati Diri Melayu
3. Mewujudkan Insfrastruktur Wilayah Yang Berkualitas
4. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Baik.

Dalam mendukung dan mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kota Dumai terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai tersebut adalah pada Misi Kota Dumai:

Gambar 2-1

Misi Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai



2.2 Tujuan Dan Sasaran

Untuk mendukung Visi dan Misi perubahan RPJMD Kota Dumai 2021-2026 tersebut Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai sesuai tugas pokok dan fungsinya menetapkan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan. Tujuan merupakan penjabaran dari Visi dan Misi yang telah ditetapkan, yakni pencapaian target keberhasilan kurun waktu lima tahun ke depan dari tahun 2021 – 2026.

Dengan berpedoman pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Dumai Tahun 2021–2026 yang telah ditetapkan, maka selanjutnya dirumuskan pernyataan tujuan dan sasaran yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Perubahan RPJMD.

Tujuan dan Sasaran merupakan tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan strategi kinerja PD selama 5 (lima) tahun.

Tujuan yang dirumuskan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai memuat esensi dari perwujudan pelaksanaan Visi dan Misi Kota Dumai. Untuk dapat merumuskan tujuan yang tepat, maka perlu mengacu pada tujuan pembangunan dalam Perubahan RPJMD Kota Dumai. Hal ini perlu dilakukan agar tujuan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai sejalan dengan Tujuan Pembangunan Daerah.

Dari tujuan yang telah ditetapkan, maka akan dirumuskan beberapa sasaran. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional, dimana tata cara pencapaian target dari Sasaran itu akan dituangkan kedalam Strategi dan Arah Kebijakan. Perumusan Sasaran memperhatikan Indikator Kinerja yang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai. Indikator Kinerja Sasaran inilah yang akan ditetapkan sebagai Indikator

Kinerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai yang akan ditetapkan dalam Penetapan Kinerja dan dijadikan acuan pelaksanaan Program Kegiatan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2-1

Tujuan dan Sasaran RPJMD dengan Tujuan dan Sasaran Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai

Tahun 2021-2026

IKU WALI KOTA			IKU DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG KOTA DUMAI		
Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Indikator RPJMD	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Renstra
Mewujudkan infrastruktur dan Ruang kota Dumai yang berkualitas dan berwawasan lingkungan	Meningkatnya infrastruktur Kota	Tingkat Pelayanan Infrastruktur Daerah	Meningkatkan Pelayanan Infrastruktur Dasar Bidang Pekerjaan Umum (Sektor Cipta Karya)		Tingkat Pelayanan infrastruktur Dasar Bidang Sektor Cipta Karya
				Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Persentase Penduduk yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik
				Terbangunnya Infrastruktur Persampahan Kota Dumai	Persentase Infrastruktur Persampahan
				Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	Persentase Penduduk Berakses air minum

				Terselenggaranya Bangunan Gedung dan Sarana untuk Kepentingan Strategis Perkotaan	Persentase bangunan gedung dan sarana strategis kota yang di selenggarakan
				Terbangunnya TPA/TPST/TPS3R/TPS Kota Dumai	Persentase terbangunnya TPA/TPST/TPS3R/TPS Kota Dumai
Mewujudkan infrastruktur dan Ruang kota Dumai yang berkualitas dan berwawasan lingkungan	Terwujudnya tata ruang daerah yang konsisten	Persentase Pemanfaatan Ruang Yang Sesuai Dengan Aturan			Persentase Kesesuaian Tata Ruang
				Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Peruntukannya	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Dengan Peruntukannya
					Persentase Penyelesaian Permasalahan pertanahan pertahun
				Tercapainya Tertib Tata Kelola Bidang Pertanahan yang Baik	Penyelesaian kasus tanah Pemerintah, Pemda dan Masyarakat

.3 Kebijakan, Strategi Dan Program

Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Berdasarkan tujuan dan sasaran, maka disusunlah langkah-langkah rencana strategis dan arah kebijakan yang dioperasionalkan ke dalam Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan merupakan penjabaran dari kebijakan strategis dengan tetap mengacu pada program Pembangunan Perubahan RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026.

Dalam kerangka tersebut, Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan untuk mencapai tujuan dan sasaran RENSTRA dengan berdaya guna dan berhasil guna, sebagai berikut:

Tabel 2-2

Strategi dan Kebijakan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota
Tahun 2024

Visi : Terwujudnya Dumai sebagai Kota Pelabuhan dan Industri yang Unggul dan Bertumpu Pada Budaya Melayu			
MISI ke 3 : Mewujudkan Infrastruktur Wilayah Yang Berkualitas			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan Pelayanan Infrastruktur Dasar Bidang Pertanahan dan Penataan Ruang	Pemenuhan Kebutuhan Pokok air minum sehari-hari	Peningkatan kinerja sistem penyediaan air bersih kota Dumai	Mengoptimalkan distribusi air bersih secara merata
	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestic	Peningkatan kualitas sanitasi perumahan dan pemukiman	Mengoptimalkan cakupan pelayanan persampahan, air bersih dan air limbah domestic
	MISI ke 5 : Mewujudkan Dumai sebagai lingkungan yang hijau		
	Terselenggaranya bangunan gedung dan sarana untuk kepentingan strategis Perkotaan	Terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup yang lestari	Memanfaatkan ruang secara bijaksana

MISI ke 5 : Mewujudkan Dumai sebagai lingkungan yang hijau			
Terwujudnya Tata Ruang yang sesuai dengan pemanfaatan ruang	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang dengan peruntukannya	Mewujudkan tata ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan	Memanfaatkan ruang secara bijaksana/Menjaga konsistensi pola penataan ruang sesuai dengan RTRW
MISI ke 3 : Mewujudkan Infrastruktur Wilayah Yang Berkualitas			
Meningkatnya infrastruktur persampahan kota dumai	Terbangunnya infrastruktur persampahan Kota Dumai	Peningkatan kualitas sanitasi perumahan dan pemukiman	Mengoptimalkan cakupan pelayanan persampahan, air bersih dan air limbah domestic
MISI ke 4 : Meningkatkan kapasitas dan profesionalitas aparatur pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan pemerintahan daerah yang baik			
Penyelesaian Permasalahan Pertanahan Pertahun	Tercapainya tertib tata kelola Bidang Pertanahan yang baik	Terwujudnya sumberdaya aparatur yang profesional dan memiliki kompetensi di bidangnya	Mewujudkan sistem organisasi dan tata kerja yang efektif dan efisien

Dengan mengacu pada strategi dan kebijakan tersebut di atas, maka dijabarkan dalam program dan kegiatan operasional Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
3. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
4. Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
5. Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya
6. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
7. Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional
8. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
9. Program Penatagunaan Tanah

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, kemudian dirumuskan Indikator Kinerja Utama yang merupakan ukuran keberhasilan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama adalah untuk memperoleh ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2-3

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai

No	Sasaran Strategis	
	Uraian	Indikator Kinerja Utama
1.		Tingkat Pelayanan infrastruktur Dasar Sektor Cipta Karya
	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Persentase Penduduk yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik
	Terbangunnya Infrastruktur persampahan Kota Dumai	Persentase Infrastruktur Persampahan
	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Persentase penduduk berakses air minum
	Terselenggaranya bangunan gedung dan sarana untuk kepentingan strategis Perkotaan	Persentase bangunan gedung dan sarana strategis kota yang diselenggarakan
	Terbangunnya TPA/TPST/TPS3R/TPS Kota Dumai	Persentase terbangunnya TPA/TPST/STA/TPS3R/TPS Kota Dumai
2.		Persentase Kesesuaian Tata Ruang
	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang dengan peruntukannya	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan Peruntukannya
3.		Persentase Penyelesaian Permasalahan pertanahan pertahun
	Tercapainya tertib tata kelola Bidang Pertanahan yang baik	Persentase Penyelesaian permasalahan Pertanahan per Tahun

2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai Tahun 2021 - 2026, yang akan dilaksanakan melalui kegiatan tahunan. Rencana kinerja tersebut diuraikan dan ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, yang merupakan komitmen Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai sasaran dan tujuan selama Tahun 2024.

Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai di Tahun 2024 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2-4
Perjanjian Kinerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai
Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1		Tingkat Pelayanan infrastruktur Dasar Sektor Cipta Karya	71,90%
	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Persentase Penduduk yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%
	Terbangunnya Infrastruktur persampahan Kota Dumai	Persentase Infrastruktur Persampahan	0
	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Persentase penduduk berakses air minum	100%
	Terselenggaranya bangunan gedung dan sarana untuk kepentingan strategis Perkotaan	Persentase bangunan gedung dan sarana strategis kota yang diselenggarakan	45,00%
	Terbangunnya infrastruktur persampahan Kota Dumai	Persentase terbangunnya TPA/TPST/STA/TPS3R/TPS Kota Dumai	0
2		Persentase Kesesuaian Tata Ruang	50,26%
	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang dengan peruntukannya	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan peruntukannya	50,26%
3		Persentase Penyelesaian Permasalahan pertanahan pertahun	60%
	Tercapainya tertib tata kelola Bidang Pertanahan yang baik	Persentase Penyelesaian permasalahan Pertanahan per Tahun	60%

Untuk mendukung pelaksanaan Sasaran Strategis Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai sebagaimana tertuang didalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023, maka Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai Kota Dumai

Tahun 2024 didukung dengan anggaran sebesar Rp. 169.846.613.191 (Seratus Enam Puluh Sembilan Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Enam Juta Enam Ratus Tiga Belas Ribu Seratus Sembilan Puluh Satu Rupiah) untuk melaksanakan 9 (Sembilan) Program Kerja antara lain :

Tabel 2-5
Program kerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai

No	Program	Anggaran	Sumber Dana
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 4.781.267.430	APBD
2.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp. 27.584.000.050	APBD
3.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Sistem Air Limbah	Rp. 2.945.663.000	APBD
4.	Program Penataan Bangunan Gedung	Rp. 80.112.254.189	APBD
5.	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Rp. 400.000.000	APBD
6.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp. 2.288.000.000	APBD
7.	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	-	APBD
8.	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Rp. 200.000.000	APBD
9.	Program Penatagunaan Tanah	Rp. 400.000.000	APBD
JUMLAH		Rp. 118.711.184.669	APBD

Seiring dengan Perubahan Anggaran maka pada tanggal September 2024 disusun Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2-6
Program kerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang

No	Program	Anggaran	Sumber Dana
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 9.753.759.324	APBD
2.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp. 41.931.295.447	APBD
3.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Sistem Air Limbah	Rp. 1.955.048.000	APBD
4.	Program Penataan Bangunan Gedung	Rp. 112.704.319.220	APBD
5.	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Rp. 400.000.000	APBD
6.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp. 2.461.191.200	APBD
7.	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	-	APBD
8.	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Rp. 241.000.000	APBD
9.	Program Penatagunaan Tanah	Rp. 400.000.000	APBD
JUMLAH		Rp. 169.846.613.191	APBD

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG KOTA DUMAI TAHUN 2024

A. Capaian Kinerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai

Kinerja merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dapat dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Pengukuran kinerja (*performance measurement*) adalah suatu proses penilaian kinerja pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Pengukuran kinerja adalah suatu metode atau alat yang digunakan untuk mencatat dan mengukur pencapaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran dan strategi sehingga dapat diketahui kemajuan organisasi dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas.

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik (*Perpres No 29 Tahun 2014*).

Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai berkewajiban melaporkan hasil kerjanya melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra tahun 2021– 2026.

Dalam regulasi ini juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Tabel 3-1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	≥ 90	Sangat Tinggi
2	$76 \leq 90$	Tinggi
3	$66 \leq 75$	Sedang
4	$51 \leq 65$	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

Pengukuran kinerja digunakan melalui metode pengukuran kinerja dengan Analisis Komparatif, untuk mengetahui kinerja suatu kegiatan dan sasaran dalam kurun waktu satu tahun, melalui penghitungan persentase pencapaian Rencana Tingkat Capaian (target) kegiatan dan sasaran. Pengukuran kinerja tersebut dituangkan dalam form Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK), dan Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS).

Dalam menentukan persentase pencapaian kinerja, digunakan 2 rumus perhitungan yaitu:

1. Apabila diasumsikan semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian (PPRTC) digunakan rumus:

a. Rumus : $\text{capaian} = \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\%$

2. Apabila diasumsikan semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, maka perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian (PPRTC) digunakan rumus:

$$b. \text{ Rumus : } \text{capaian} = \text{target} - \frac{\text{realisasi} - \text{target}}{\text{target}} \times 100\%$$

Sedangkan pemberian atribut pada capaian masing-masing indikator kinerja, dengan kriteria sebagaimana tabel, yaitu :

Tabel 3-2
Atribut Capaian Indikator Kinerja

No	Nilai Capaian Kinerja		Atribut
	%	Keterangan Persentase	
1	85% s.d 100%	Delapan puluh lima persen sampai dengan seratus persen	Sangat Berhasil
2	70% s.d < 85%	Tujuh puluh persen sampai dengan kurang dari delapan puluh lima persen	Berhasil
3	55% s.d < 70%	Lima puluh lima persen sampai dengan kurang dari tujuh puluh persen	Cukup Berhasil
4	< 55%	Di bawah lima puluh lima persen	Tidak Berhasil

3.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

a. Indikator Persentase Penduduk yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik

Capaian kinerja untuk indikator Persentase Penduduk yang Berakses Sanitasi menunjukkan capaian yang meningkat. Target yang ditetapkan tahun 2024 adalah 100% realisasi sebesar 82,40% tercapai 82,40% atau bernilai kinerja tinggi. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 82,35% atau tercapai sebesar 82,35%, maka capaian tahun 2024 meningkat sebesar 0,05%.

Efisiensi Anggaran	1,68%
Nilai Anggaran	Rp. 1.955.084.000
Capaian 2024	82,40%
Target	100%
Realisasi	82,40%

b. Indikator Persentase Persentase Infrastruktur Persampahan

Capaian kinerja untuk indikator Persentase Infrastruktur Persampahan menunjukkan capaian yang menurun. Target yang ditetapkan tahun 2024 adalah 42,59% realisasi sebesar 50% yang merupakan akumulasi dari tahun sebelumnya tercapai 117,40% atau bernilai Sangat Berhasil. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 82,35% atau tercapai sebesar 122,73 %, maka capaian tahun 2024 menurun sebesar 5,33%.

Efisiensi Anggaran	-
Nilai Anggaran	Rp. -
Capaian 2024	117,40%
Target	42,59%
Realisasi	50%

c. Indikator Persentase Penduduk Berakses air minum

Capaian kinerja untuk indikator Persentase Penduduk Berakses air minum menunjukkan capaian yang menurun. Target yang ditetapkan tahun 2024 adalah 100% realisasi sebesar 15,38% tercapai 15,38% atau bernilai kinerja sangat rendah. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 58,26% atau tercapai sebesar 100%, maka capaian tahun 2024 menurun sebesar 83,86%.

Efisiensi Anggaran	0,26%
Nilai Anggaran	Rp. 41.931.295.447
Capaian 2024	15,38%
Target	100%
Realisasi	15,38%

d. Indikator Persentase Bangunan Gedung dan Sarana Strategis Kota yang Diselenggarakan

Capaian kinerja untuk indikator Persentase Bangunan Gedung dan Sarana Strategis Kota yang diselenggarakan menunjukkan capaian menurun. Target yang ditetapkan tahun 2024 adalah 45,00% realisasi sebesar 45,00% tercapai 100% atau bernilai kinerja sangat berhasil. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 90% atau tercapai sebesar 219,51%, maka capaian tahun 2024 menurun 119,51%.

Efisiensi Anggaran	2,06%
Nilai Anggaran	Rp. 113.104.319.220
Capaian 2024	100%
Target	45,00%
Realisasi	45,00%

e. Indikator Persentase terbangunya TPA/TPST/TPS3R/TPS Kota Dumai

Capaian kinerja untuk indikator Persentase Terbangunya TPA/TPST/TPS3R/TPS Kota Dumai menunjukkan capaian yang menurun. Target yang ditetapkan tahun 2024 adalah 0% realisasi sebesar 0% tercapai 0% atau bernilai kinerja sangat rendah. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 0% atau tercapai sebesar 0%, maka capaian tahun 2024 adalah tetap yaitu 0%.

Efisiensi Anggaran	0%
Nilai Anggaran	Rp. -
Capaian 2024	0%
Target	0%
Realisasi	0%

f. Indikator Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Dengan Peruntukannya

Capaian kinerja untuk indikator Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Dengan Peruntukannya menunjukkan capaian yang tetap. Target yang ditetapkan tahun 2024 adalah 50,26% realisasi sebesar 50,26% tercapai 100% atau bernilai kinerja sangat tinggi. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 48,46% atau tercapai sebesar 100%, maka capaian tahun 2024 tetap yaitu 100%.

Efisiensi Anggaran	2,12%
Nilai Anggaran	Rp. 2.461.191.200
Capaian 2024	100%
Target	50,26%
Realisasi	50,26%

g. Indikator Persentase Penyelesaian Permasalahan Pertanahan Pertahun

Capaian kinerja untuk indikator Persentase Penyelesaian Kasus Tanah Pemerintahan, Pemda, dan Masyarakat menunjukkan capaian yang tetap. Target yang ditetapkan tahun 2024 adalah 60% realisasi sebesar 72% tercapai 120% atau bernilai kinerja sangat tinggi. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 48,00% atau tercapai sebesar 120%, maka capaian tahun 2024 tetap sebesar 120%.

Efisiensi Anggaran	3,08%
Nilai Anggaran	Rp. 641.000.000
Capaian 2024	120%
Target	60%
Realisasi	72%

3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Untuk mengukur akuntabilitas kinerja, perlu dilakukan perbandingan untuk melihat tabel peningkatan atau penurunan suatu capaian kinerja, sehingga bisa dievaluasi dan diperbaiki untuk peningkatan kinerja di tahun berikutnya. Perbandingan data kinerja antara realisasi kinerja tahun 2024 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir untuk setiap indikatornya adalah sebagai berikut

Tabel 3-3
Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2024 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target			Realisasi			Capaian		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
1		Tingkat Pelayanan infrastruktur Dasar Bidang Sektor Cipta Karya	68,47%	70,44%	71,90%	61,40%	70,15%	48,20%	89,67%	99,59%	67,03%
	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Llimbah Domestik	Persentase penduduk yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik berakses sanitasi	100%	100%	100%	92,83%	82,35%	82,40%	92,83%	82,35%	82,40%
	Terbangunnya Infrastruktur persampahan Kota Dumai	Persentase Infrastruktur Persampahan	38,89%	40,47%	42,59%	50,00%	50,00%	50,00%	128%	122,73%	117,40%
	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Persentase penduduk berakses air minum	100%	100%	100%	55,26%	58,26%	15,38%	55,26%	58,26%	15,38%
	Terselenggaranya bangunan gedung dan sarana untuk kepentingan strategis Perkotaan	Persentase bangunan gedung dan sarana strategis kota yang diselenggarakan	35,00%	41,00%	45,00%	70,00%	90,00%	45,00%	200%	219,51%	100%
	Terbangunnya TPA/TPST/STA/TPS3R/TPS Kota Dumai	Persentase terbangunnya TPA/TPST/STA/TPS3R/TPS Kota Dumai	93,00%	-	-	38,89%	-	-	41,82%	-	-
2		Persentase Kesesuaian Tata Ruang	47,53%	48,46%	50,26%	47,53%	48,46%	50,26%	100%	100%	100%
	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang dengan peruntukannya	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan peruntukannya	47,53%	48,46%	50,26%	47,53%	48,46%	50,26%	100%	100%	100%

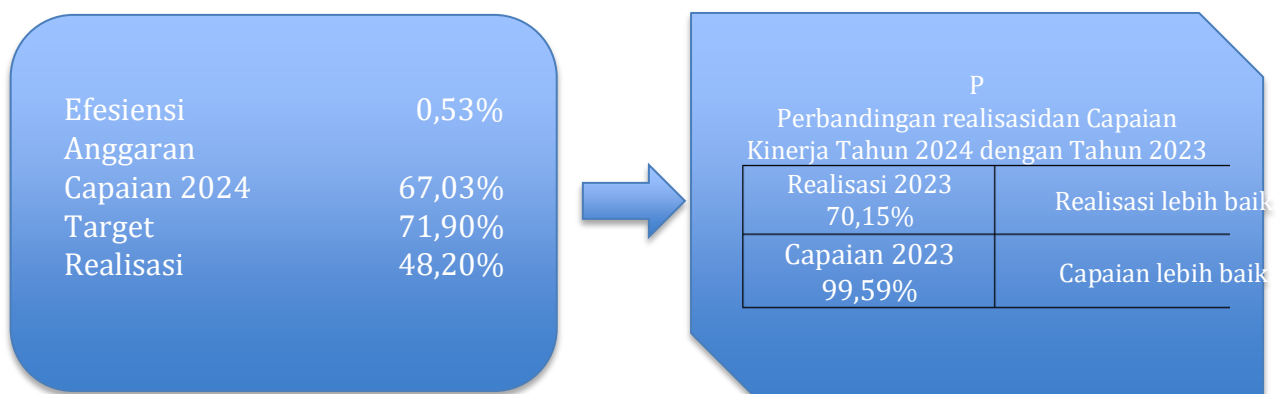
3		Persentase Penyelesaian Permasalahan pertanahan pertahun	20%	40%	60%	20%	48%	72%	100%	120%	120%
10	Tercapainya tertib tata kelola Bidang Pertanahan yang baik	Penyelesaian kasus tanah Pemerintah, Pemda dan Masyarakat	20%	40%	60%	20%	48%	72%	100%	120%	120%

Dari perbandingan di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. a. Pada tahun 2022 terdapat sepuluh Indikator Kinerja Utama yang harus diampu oleh Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai selama 5 tahun kedepan. Indikator pertama adalah Tingkat Pelayanan infrastruktur Dasar Bidang Sektor Cipta Karya dengan target pada tahun 2022 adalah 68,47%.
 - b. Realisasi pada tahun 2023 adalah 70,15% dengan capaian 99,59%.
 - c. Pada tahun 2024 target kinerja naik menjadi 71,90% dan realisasinya adalah 48,20% dengan capaian kinerja 67,03%.

Permasalahan yang dihadapi, yaitu :

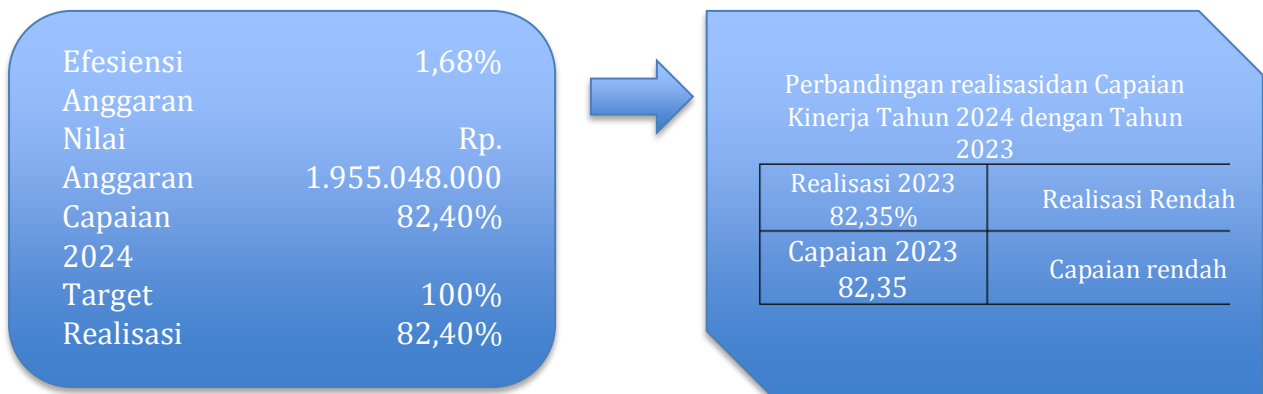
- Terbatasnya anggaran pemerintah daerah.
- Kegiatan instruksi Presiden yang belum terlaksana.



2. a. Indikator Kinerja Utama yang ke dua adalah Persentase Penduduk yang Memeperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik berakses sanitasi dengan target pada tahun 2022 adalah 100%.
 - b. Realisasi pada tahun 2023 adalah 82,35% dengan capaian 82,35%.
 - c. Pada tahun 2024 target kinerja naik menjadi 100% dan realisasinya adalah 82,40% dengan capaian kinerja 82,40%.

Permasalahan yang dihadapi, yaitu :

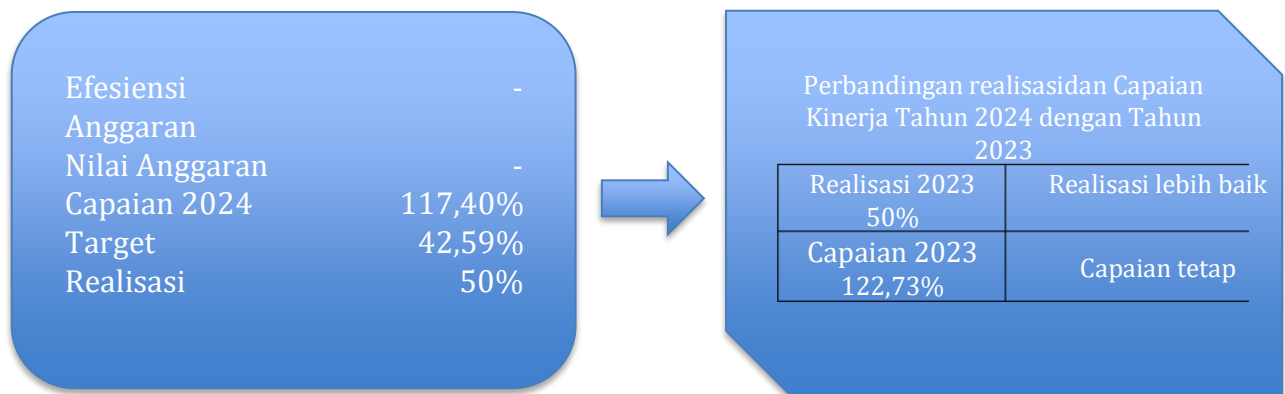
- Terbatasnya anggaran pemerintah daerah.
- Kegiatan instruksi Presiden yang belum terlaksana.



3. a. Indikator Kinerja yang ke tiga adalah Persentase Infrastruktur Persampahan dengan target pada tahun 2022 adalah 38,89%.
 b. Realisasi pada tahun 2023 adalah 50% dengan capaian 122,73%.
 c. Pada tahun 2024 target kinerja meningkat menjadi 42,59% dan realisasinya adalah 50% dengan capaian kinerja 117,4%.

Permasalahan yang dihadapi, yaitu :

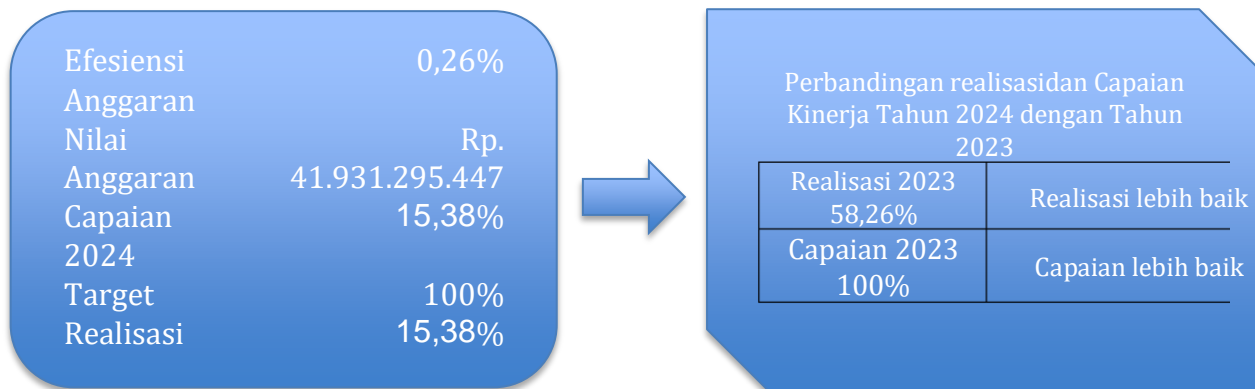
- Masih kurangnya partisipasi Masyarakat.
- Kebanyakan material tidak di datangkan dari luar Dumai.



4. a. Indikator Kinerja yang ke empat Persentase Penduduk Berakses Air Minum dengan peruntukannya dengan target pada tahun 2022 adalah 100%.
 b. Realisasi pada tahun 2023 adalah 100% dengan capaian 58,26%.
 c. Pada tahun 2024 target kinerja tetap yaitu 100% dan realisasinya adalah 15,38% dengan capaian kinerja 15,38%.

Permasalahan yang dihadapi, yaitu :

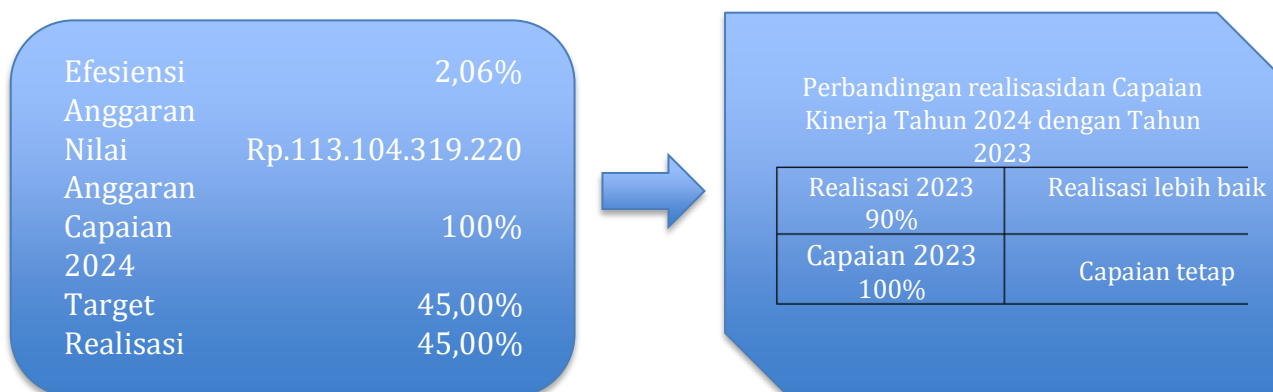
- Terbatasnya anggaran pemerintah daerah.
- Kegiatan instruksi Presiden yang belum terlaksana



5. a. Indikator Kinerja yang ke lima adalah Persentase Bangunan Gedung dan Sarana Strategis Kota yang diselenggarakan dengan target pada tahun 2022 adalah 35%.
- b. Realisasi pada tahun 2023 adalah 90% dengan capaian 219,51%.
- c. Pada tahun 2024 target kinerja turun menjadi 45,00% dan realisasinya adalah 45,00% dengan capaian kinerja 100%.

Permasalahan yang dihadapi, yaitu :

- Masih kurangnya partisipasi Masyarakat.
- Kebanyakan material tidak di datangkan dari luar Dumai.



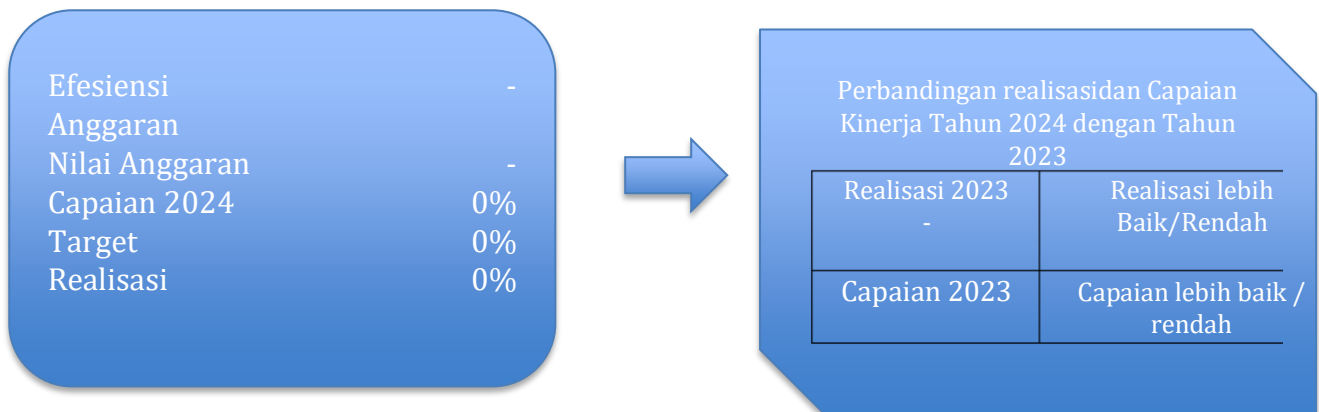
6. a. Indikator Kinerja yang ke enam Persentase terbangunnya

TPA/TPST/STA/TPS3R/TPS Kota Dumai dengan target pada tahun 2022 adalah -%.

- b. Realisasi pada tahun 2023 adalah 0% dengan capaian 0%.
- c. Pada tahun 2024 target kinerja tetap menjadi 0% dan realisasinya adalah 0% dengan capaian kinerja 0%.

Permasalahan yang dihadapi, yaitu :

- Tidak tersedianya anggaran pembangunan infrastruktur persampahan.

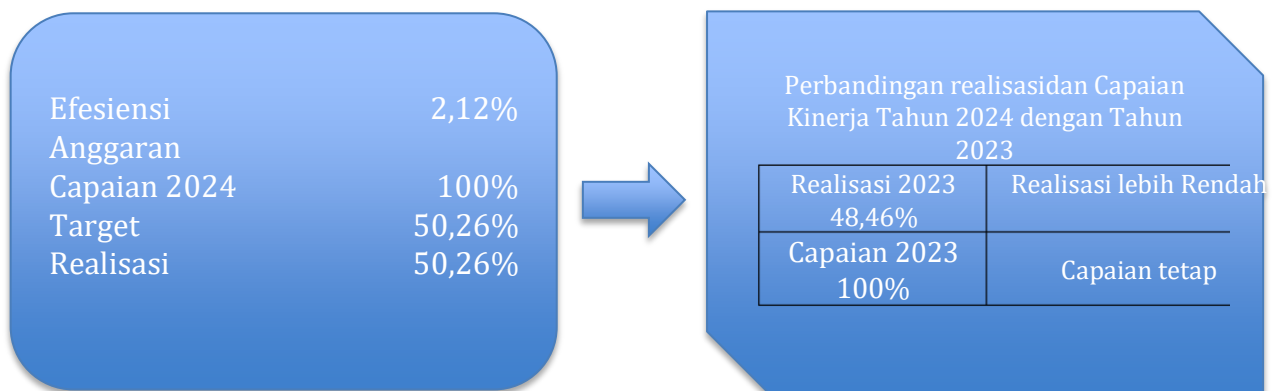


7. a. Indikator Kinerja yang ke tujuh Persentase kesesuaian pemanfaatan Tata Ruang dengan target pada tahun 2022 adalah 47,53%.

- b. Realisasi pada tahun 2023 adalah 48,46% dengan capaian 100%.
- c. Pada tahun 2024 target kinerja naik 50,26% dan realisasinya adalah 50,26% dengan capaian kinerja 100%.

Permasalahan yang dihadapi, yaitu :

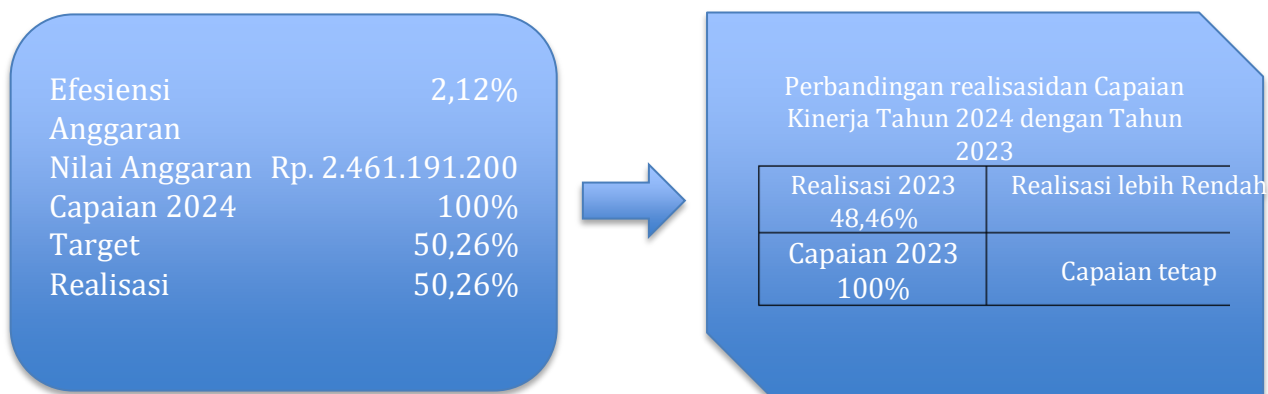
- website gistaru.atrbpn.go.id dan Online Single Submission (OSS) masih dalam tahap pengembangan sehingga tidak dapat diakses dalam waktu tertentu, sehingga masyarakat tidak dapat mengetahui informasi tata ruang.



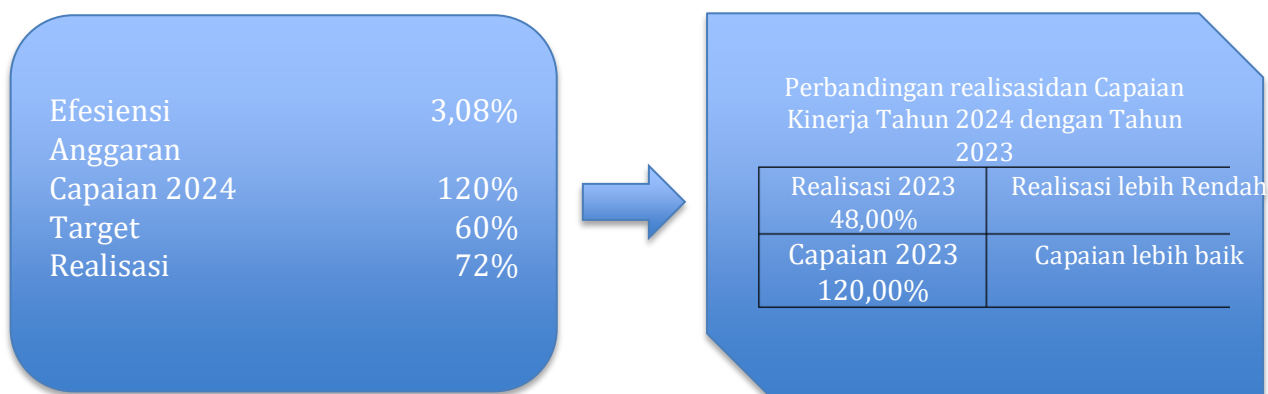
8. a. Indikator Kinerja yang ke delapan Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan peruntukannya dengan target pada tahun 2022 adalah 47,53%.
 - b. Realisasi pada tahun 2023 adalah 48,46% dengan capaian 100%.
 - c. Pada tahun 2024 target kinerja naik 50,26% dan realisasinya adalah 50,26% dengan capaian kinerja 100%.

Permasalahan yang dihadapi, yaitu :

- website gistaru.atrbpn.go.id dan Online Single Submission (OSS) masih dalam tahap pengembangan sehingga tidak dapat diakses dalam waktu tertentu, sehingga masyarakat tidak dapat mengetahui informasi tata ruang.



9. a. Indikator Kinerja yang ke sembilan Persentase Penyelesaian Permasalahan Pertanahan per Tahun dengan target pada tahun 2022 adalah 20%.
 - b. Realisasi pada tahun 2023 adalah 48% dengan capaian 120%.
 - c. Pada tahun 2024 target kinerja naik menjadi 60% dan realisasinya adalah 72% dengan capaian kinerja 120%.

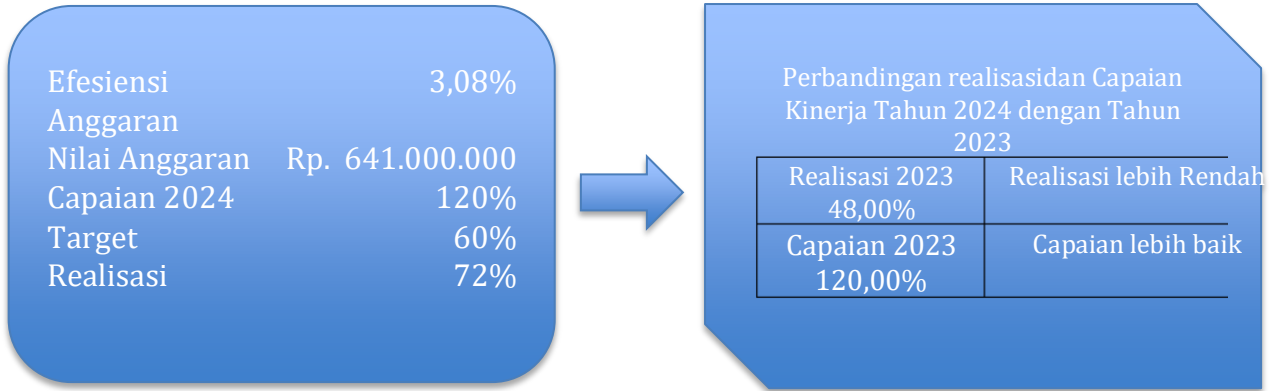


10. a. Indikator Kinerja yang ke sepuluh Persentase Penyelesaian Kasus Tanah

Pemerintah, Pemda, dan Masyarakat dengan target pada tahun 2022 adalah 20%.

b. Realisasi pada tahun 2023 adalah 48% dengan capaian 120%.

c. Pada tahun 2024 target kinerja naik menjadi 60% dan realisasinya adalah 72% dengan capaian kinerja 120%.

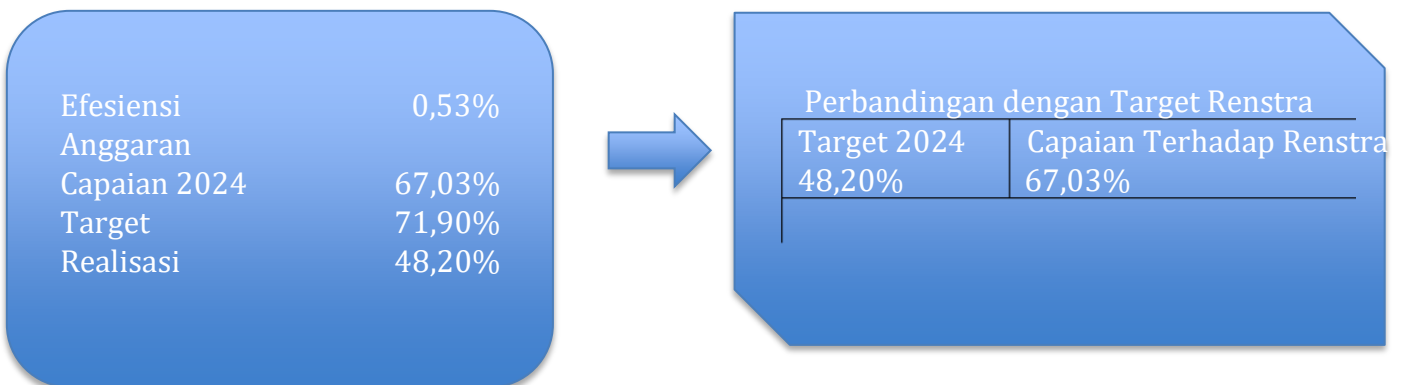


3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Renstra

Perbandingan realisasi kinerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai Tahun 2024 sampai dengan periode Rencana Strategis Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai Tahun 2021 – 2026 yaitu:

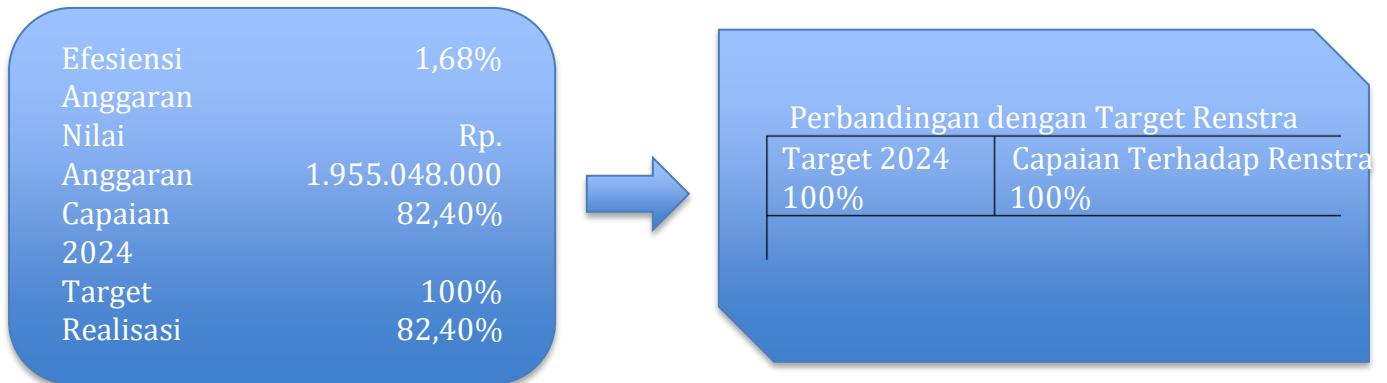
1. Indikator Tingkat Pelayanan insfrastruktur Dasar Bidang Sektor Cipta Karya

Pada perencanaan lima tahunan, capaian Indikator Tingkat Pelayanan Infrastruktur Dasar Bidang Sektor Cipta Karya tahun 2024 kurang dari target Renstra yaitu sebesar 23,70% dari target Renstra 71,90% dan terealisasi 48,20% pada tahun 2024.



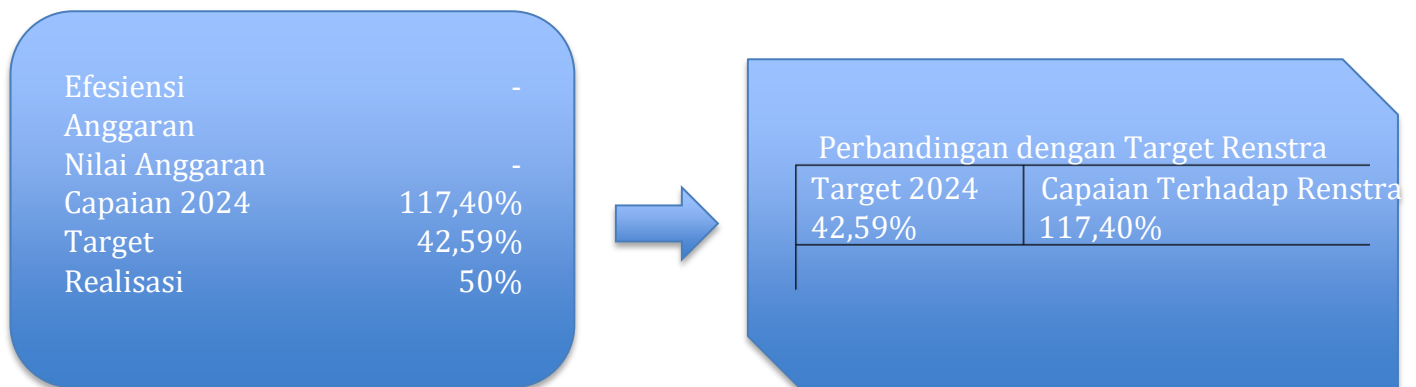
2. Indikator Persentase Penduduk yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik Berakses Sanitasi

Pada perencanaan lima tahunan, capaian Indikator Persentase Penduduk yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik Berakses Sanitasi tahun 2024 kurang dari target akhir Renstra yaitu sebesar 17,6% dari target Renstra sebesar 100% dan terealisasi 82,40% pada tahun 2024.



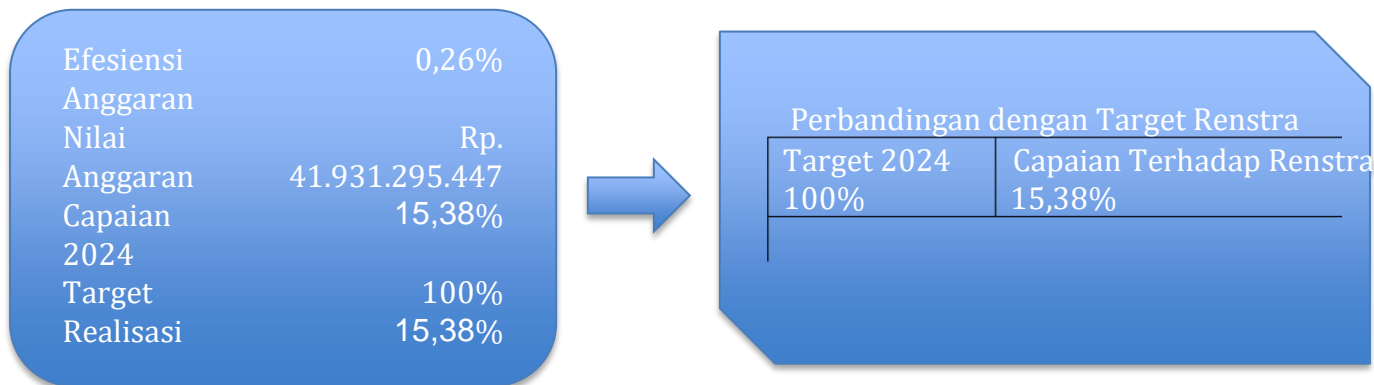
3. Indikator Persentase Infrastruktur Persampahan

Pada perencanaan lima tahunan, capaian Indikator Persentase Infrastruktur Persampahan tahun 2024 kurang dari target akhir Renstra yaitu sebesar 7,41% dari target Renstra sebesar 42,59% dan terealisasi 117,40% pada tahun 2024.



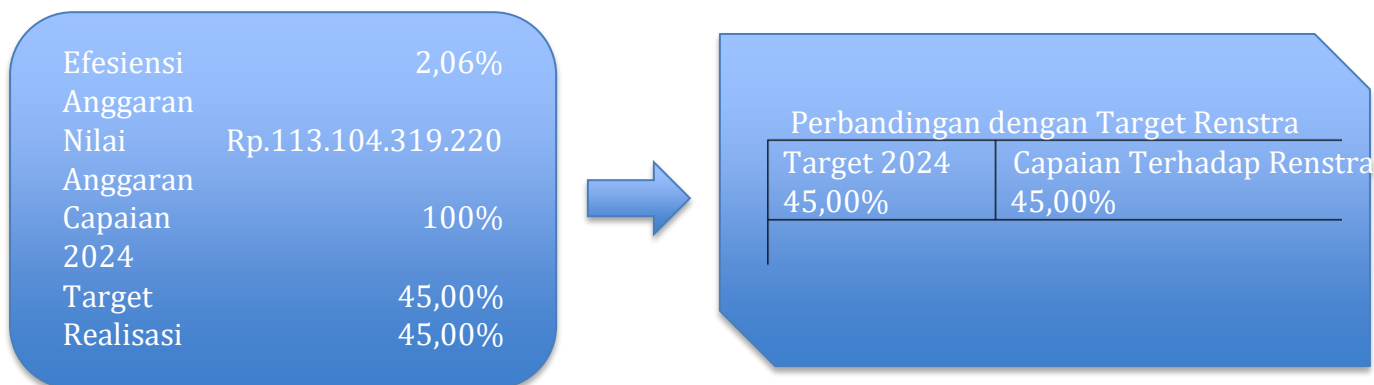
4. Indikator Persentase Penduduk Berakses Air Minum

Pada perencanaan lima tahunan, capaian Indikator Persentase penduduk berakses air minum tahun 2024 kurang dari target akhir Renstra yaitu sebesar 83,86% dari target Renstra sebesar 100% dan terealisasi 15,38% pada tahun 2024.



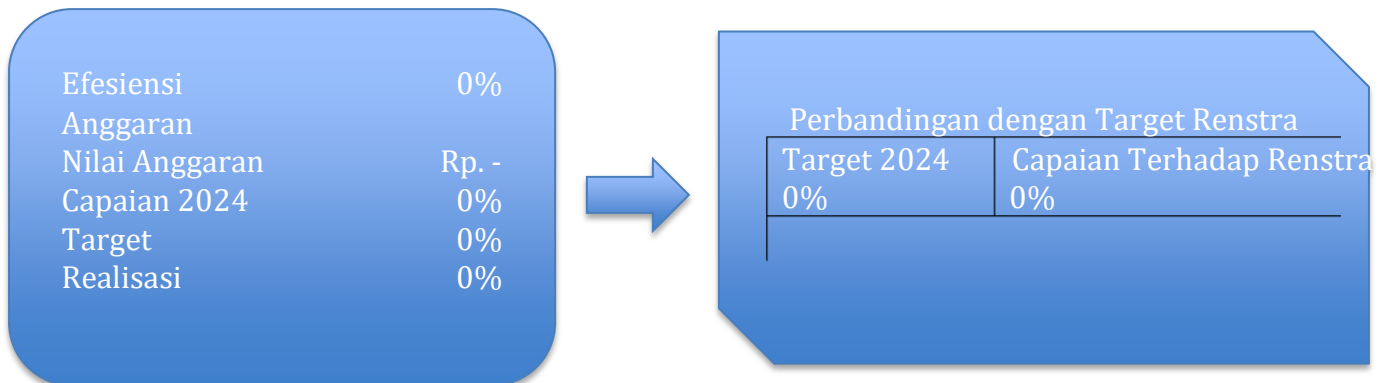
5. Indikator Persentase Bangunan Gedung dan Sarana Strategis Kota yang Diselenggarakan

Pada perencanaan lima tahunan, capaian Indikator Persentase Bangunan Gedung dan Sarana Strategis Kota yang Diselenggarakan tahun 2024 sudah cukup dari target akhir Renstra yaitu sebesar 0% dari target Renstra sebesar 45,00 % dan terealisasi 45,00 % pada tahun 2024.



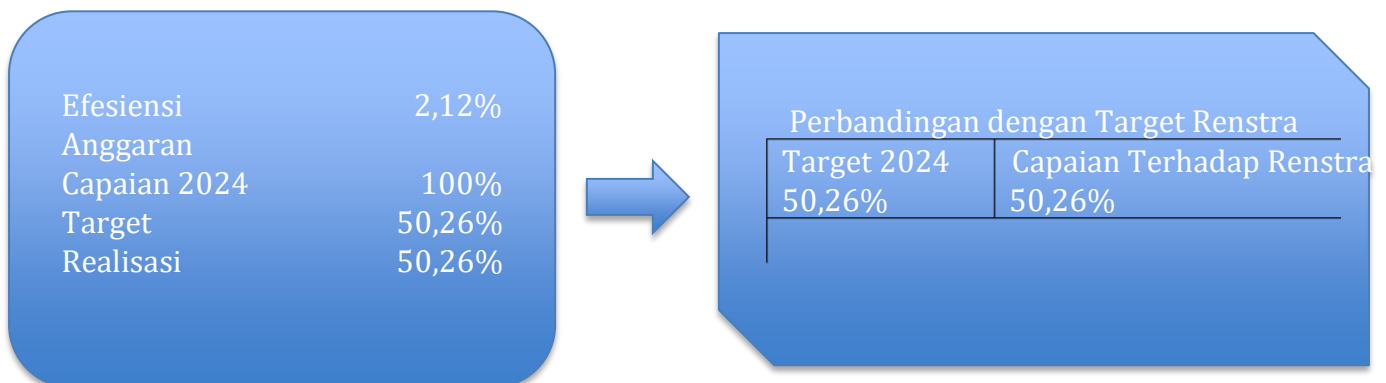
6. Indikator Persentase terbangunnya TPA/TPST/TPS3R/TPS Kota Dumai

Pada perencanaan lima tahunan, capaian Indikator Persentase Terbangunnya TPA/TPST/TPS3R/TPS Kota Dumai tahun 2024 sudah cukup dari target akhir Renstra yaitu sebesar 0% dari target Renstra sebesar 0% dan terealisasi 0% pada tahun 2024.



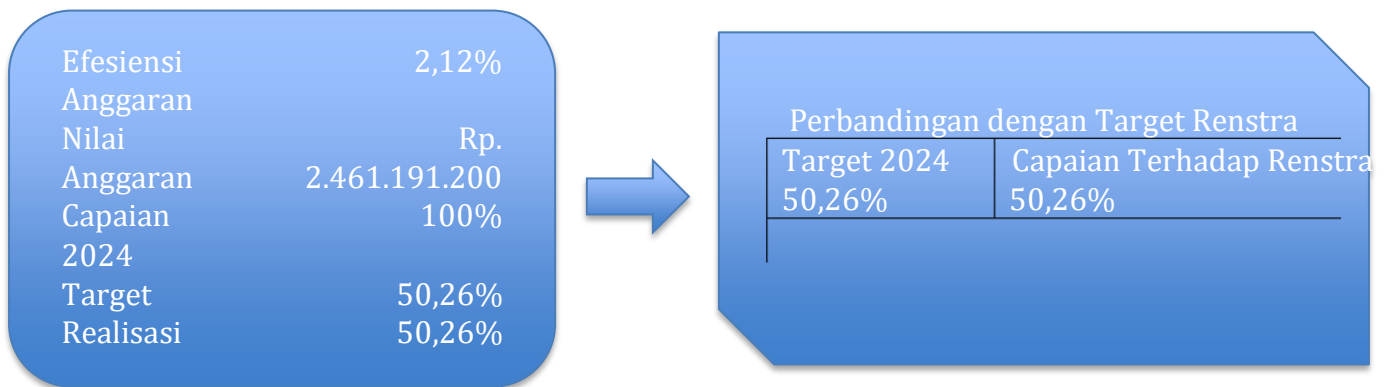
7. Indikator Persentase Kesesuaian Tata Ruang

Pada perencanaan lima tahunan, capaian Indikator Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Peruntukannya tahun 2024 tetap dari target akhir Renstra yaitu sebesar 50,26% dari target Renstra sebesar 50,26% dan terealisasi 50,26% pada tahun 2024.



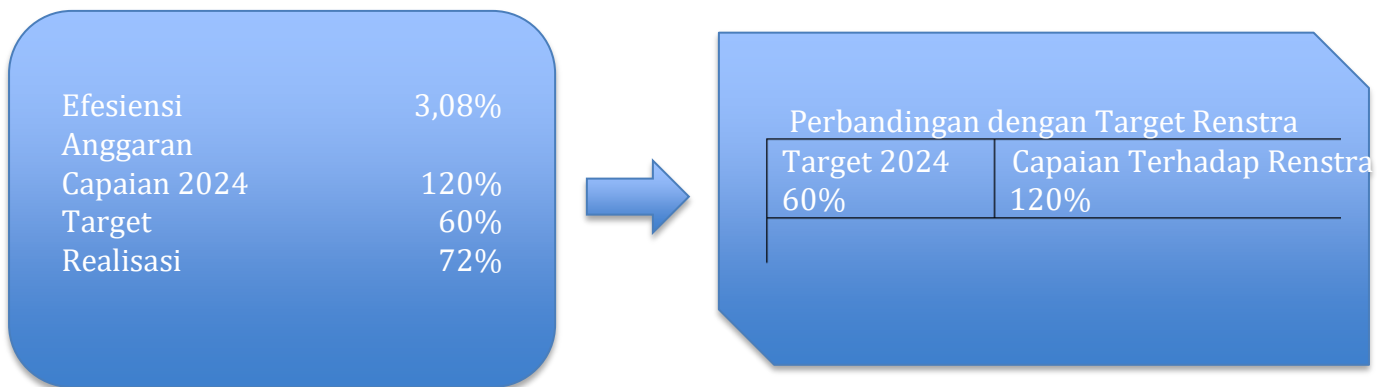
8. Indikator Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Peruntukannya

Pada perencanaan lima tahunan, capaian Indikator Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Peruntukannya tahun 2024 tetap dari target akhir Renstra yaitu sebesar 50,26% dari target Renstra sebesar 50,26% dan terealisasi 50,26% pada tahun 2024.



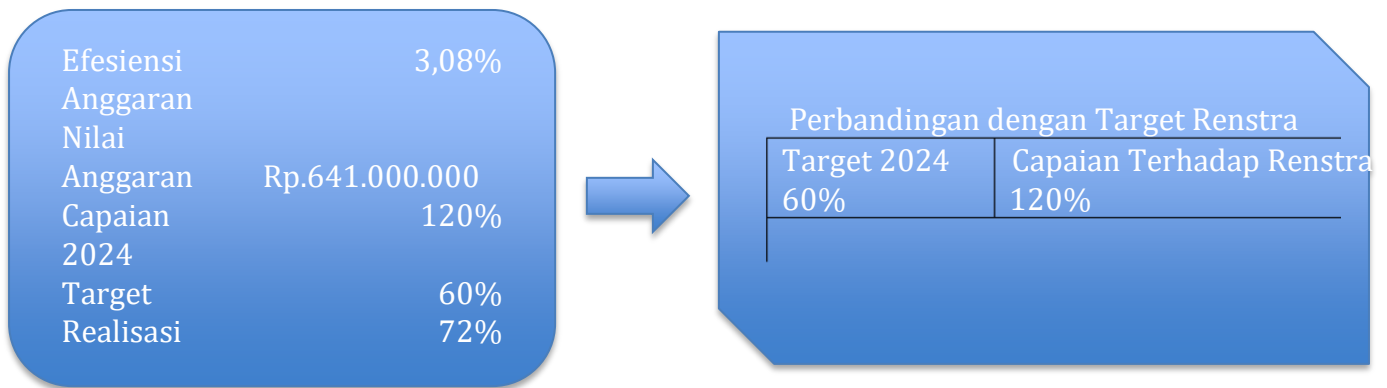
9.Indikator Persentase Penyelesaian Permasalahan Pertanahan Pertahun

Pada perencanaan lima tahunan, capaian Indikator Persentase penyelesaian Permasalahan Pertanahan Pertahun tahun 2024 sudah melebihi dari target akhir Renstra yaitu sebesar 40% dari target Renstra sebesar 60% dan terealisasi 100% pada tahun 2024.



10.Indikator Persentase Penyelesaian Kasus Tanah Pemerintah, Pemda, dan Masyarakat

Pada perencanaan lima tahunan, capaian Indikator Persentase penyelesaian Penyelesaian Kasus Tanah Pemerintah, Pemda, dan Masyarakat tahun 2024 sudah melebihi dari target akhir Renstra yaitu sebesar 40% dari target Renstra sebesar 60% dan terealisasi 100% pada tahun 2024.



3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Standar Nasional

Bersama ini kami sajikan perbandingan realisasi kinerja dengan standar nasional sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3-4
Perbandingan realisasi Kinerja Dengan Standar Nasional

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2024	STANDAR NASIONAL	KETERANGAN
1		Tingkat Pelayanan infrastruktur Dasar Bidang Sektor Cipta Karya	48,20%	-	Tidak ada standar nasional yg berhubungan langsung dengan kinerja Dinas
	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah	Persentase Penduduk yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	82,40%	-	Tidak ada standar nasional yg berhubungan langsung dengan kinerja Dinas
	Terbangunnya Infrastruktur persampahan	Persentase Infrastruktur Persampahan	50%	-	Tidak ada standar nasional yg berhubungan langsung dengan kinerja Dinas
	Pemenuhan Kebutuhan Pokok air Minum Sehari-hari	Indikator Persentase Penduduk Berakses Air Minum	15,38%	-	Tidak ada standar nasional yg berhubungan langsung dengan kinerja Dinas

	Terselenggaranya bangunan gedung dan sarana untuk kepentingan strategis perkotaan	Indikator Persentase Bangunan Gedung dan Sarana Strategis Kota yang Diselenggarakan	45%	-	Tidak ada standar nasional yg berhubungan langsung dengan kinerja Dinas
	Terbangunnya TPA/TPST/TPS3R/TPS Kota Dumai	Indikator Persentase terbangunnya TPA/TPST/TPS3R/TPS Kota Dumai	0%	-	Tidak ada standar nasional yg berhubungan langsung dengan kinerja Dinas
2		Persentase Kesesuaian Tata Ruang	50,26%	-	Tidak ada standar nasional yg berhubungan langsung dengan kinerja Dinas
	Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan dengan Peruntukannya	Indikator Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan peruntukannya	50,26%	-	Tidak ada standar nasional yg berhubungan langsung dengan kinerja Dinas
3		Persentase Penyelesaian Permasalahan pertanahan pertahun	72%	-	Tidak ada standar nasional yg berhubungan langsung dengan kinerja Dinas
	Tercapainya tertib tatakelola bidang pertanahan yang baik	Penyelesaian kasus tanah Pemerintah, Pemda dan Masyarakat	72%	-	Tidak ada standar nasional yg berhubungan langsung dengan kinerja Dinas

3.5 Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi

1. Indikator Persentase Penduduk yang Persentase Penduduk yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik
 - a. **Capaian kinerja** untuk indikator Persentase Penduduk yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domnestic menunjukkan capaian yang meningkat. Target yang ditetapkan tahun 2024 adalah 100% realisasi sebesar

82,40% tercapai 82,40% atau bernilai kinerja tinggi. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 82,35% atau tercapai sebesar 82,35%, maka capaian tahun 2024 meningkat sebesar 0,05%.

- b. **Faktor pendukung/pendorong capaian indikator** Persentase Penduduk yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik Kurang melebihi target yang telah dite 40 adalah sebagai berikut:
- Penambahan pelayanan akses sanitasi di area berisiko sanitasi berdasarkan dokumen ssk.
 - Perlunya pendataan penerima manfaat tepat sasaran dengan lokasi yang ditentukan berdasarkan dokumen ssk.
- c. **Faktor penghambat Capaian Indikator** Persentase Penduduk yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik adalah sebagai berikut:
- Kemampuan keuangan yang terbatas.
 - Belum tepatnya sasaran.
- d. **Tindak lanjut Capaian Indikator** Persentase Penduduk yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik adalah sebagai berikut:
- Penganggaran sesuai kebutuhan.
 - Penyusunan program penangan area berisiko dengan pembangunan Sanitasi.
 - Mempunyai daftar calon penerima manfaat sesuai dengan BNBA yang tepat sasaran.

2. Indikator Persentase Infrastruktur Persampahan Kota Dumai

- a. **Capaian kinerja** untuk indikator Persentase Infrastruktur Persampahan Kota Dumai menunjukkan capaian yang menurun. Target yang ditetapkan tahun 2024 adalah 42,59% realisasi sebesar 50% tercapai 117,40% atau bernilai kinerja sangat rendah. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 50% atau tercapai sebesar 122,73%, maka capaian tahun 2024 menurun.
- b. **Faktor penghambat Capaian Indikator** Persentase Infrastruktur Persampahan Kota Dumai adalah sebagai berikut:
- Tidak tersedianya anggaran pembangunan infrastruktur persampahan.
- c. **Tindak lanjut Capaian Indikator** Persentase Infrastruktur Persampahan Kota Dumai adalah sebagai berikut:
- Menganggarkan sesuai dengan kebutuhan

3. Indikator Persentase Penduduk Berakses Air Minum

- a. **Capaian kinerja** untuk indikator Persentase Penduduk Berakses Air Minum menunjukkan capaian yang menurun. Target yang ditetapkan tahun 2024 adalah 100% realisasi sebesar 15,38% tercapai 15,38% atau bernilai kinerja sangat rendah. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 58,26% atau tercapai sebesar 100%, maka capaian tahun 2024 menurun sebesar 42,88%.
- b. **Faktor Pendukung/Pendorong capaian indikator** Persentase Penduduk Berakses Air Minum kurang melebihi target yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:
 - Pengembangan jaringan perpipaan.
 - Penambahan jumlah unit SR.
- c. **Faktor penghambat Capaian Indikator** Persentase Penduduk Berakses Air Minum adalah sebagai berikut:
 - Jaringan perpipaan yang belum merata.
 - Terbatasnya jumlah unit SR.
 - Kemampuan keuangan yang terbatas.
- d. **Tindak lanjut Capaian Indikator** Persentase Penduduk Berakses Air Minum adalah sebagai berikut:
 - Melakukan perluasan jaringan perpipaan.
 - Memberikan bantuan subsidi unit SR kepada masyarakat berpenghasilan rendah.

4. Indikator Persentase Bangunan Gedung dan Sarana Strategis Kota yang Diselenggarakan

- a. **Capaian kinerja** untuk indikator Persentase Bangunan Gedung dan Sarana Strategis Kota yang Diselenggarakan menunjukkan capaian yang tetap. Target yang ditetapkan tahun 2024 adalah 45,00% realisasi sebesar 45,00% tercapai 100% atau bernilai kinerja sangat tinggi. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 90% atau tercapai sebesar 100%, maka capaian tahun 2024 adalah tetap.
- b. **Faktor pendukung/pendorong capaian indikator** Persentase Bangunan Gedung dan Sarana Strategis Kota yang Diselenggarakan kurang melebihi target yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:

- Kejelasan Tata Ruang Kota Dumai.
- Kejelasan status tanah lokasi pembangunan gedung kantor.
- Tersedianya anggaran pembangunan gedung.
- Tersedianya sumber daya manusia yang mumpuni dalam penyelenggaraan bangunan gedung.

c. **Faktor penghambat Capaian Indikator** Persentase Bangunan Gedung dan Sarana Strategis Kota yang Diselenggarakan adalah sebagai berikut:

- Masih kurangnya partisipasi Masyarakat.
- Kebanyakan material tidak di datangkan dari luar Dumai

d. **Tindak lanjut Capaian Indikator** Persentase Bangunan Gedung dan Sarana Strategis Kota yang Diselenggarakan adalah sebagai berikut:

- Melakukan sosialisasi pada masyarakat terkait bangunan gedung.
- Melakukan inventarisasi kembali kebutuhan gedung dan sarana strategis.

5. Indikator Persentase terbangunnya TPA/TPST/STA/TPS3R/TPS Kota Dumai

a. Capaian kinerja untuk indikator Persentase terbangunnya TPA/TPST/STA/TPS3R/TPS Kota Dumai menunjukkan capaian yang menurun. Target yang ditetapkan tahun 2024 adalah 0% realisasi sebesar 0% tercapai 0% atau bernilai kinerja sangat rendah. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 0% atau tercapai sebesar 0%, maka capaian tahun 2024 menurun.

b. Faktor penghambat Capaian Indikator Persentase terbangunnya TPA/TPST/STA/TPS3R/TPS Kota Dumai adalah sebagai berikut:

- Tidak tersedianya anggaran pembangunan infrastruktur persampahan.

c. Tindak lanjut Capaian Indikator Persentase terbangunnya TPA/TPST/STA/TPS3R/TPS Kota Dumai adalah sebagai berikut:

- Menganggarkan sesuai dengan kebutuhan.

6. Indikator Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Peruntukannya

a. Capaian kinerja untuk indikator Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Peruntukannya menunjukkan capaian yang tetap. Target yang ditetapkan tahun 2024 adalah 50,26 % realisasi sebesar 100% tercapai 50,26% atau bernilai kinerja sedang. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 7,75% atau tercapai sebesar 100%, maka capaian tahun 2024 tetap sebesar 100%

- b. **Faktor pendukung/pendorong capaian indikator** Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Peruntukannya kurang melebihi target yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:
- Ketersediannya informasi mengenai tata ruang yang dapat di akses masyarakat melalui website gistaru.atrbpn.go.id dan website oss untuk perizinan dan investasi di Kota Dumai.
- c. **Faktor penghambat Capaian Indikator** Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Peruntukannya adalah sebagai berikut:
- website gistaru.atrbpn.go.id dan Online Single Submission (OSS) masih dalam tahap pengembangan sehingga tidak dapat diakses dalam waktu tertentu, sehingga masyarakat tidak dapat mengetahui informasi tata ruang.
- d. **Tindak lanjut Capaian Indikator** Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Peruntukannya adalah sebagai berikut:
- Bidang Tata Ruang sedang menyusun website SIPETARUNG untuk informasi penataan ruang dan kemudahan perizinan bagi Masyarakat yang berinvestasi di Kota Dumai.
 - Mengoptimalkan fungsi Forum Penataan Ruang (FPR) terkait penyelesaian dan permasalahan pemanfaatan ruang.
 - Menyelesaikan Rencana Detail Tata Ruang se-Kota Dumai untuk kemudahan dan percepatan alur perizinnan.

7. Indikator Persentase Penyelesaian Permasalahan Pertanahan per Tahun

- a. **Capaian kinerja** untuk indikator Persentase Penyelesaian Permasalahan Pertanahan per Tahun menunjukkan capaian yang menurun. Target yang ditetapkan tahun 2024 adalah 60% realisasi sebesar 100% tercapai 166,67% atau bernilai kinerja sangat tinggi. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 48,00% atau tercapai sebesar 240,00%, maka capaian tahun 2024 menurun 73,33%.
- b. **Faktor pendukung/pendorong capaian indikator** Persentase Penyelesaian Permasalahan Pertanahan per Tahun sesuai target yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:
- Pemberkasan data-data dari tahun—tahun sebelumnya di susun secara rapi jikalau dibutuhkan data-data tersebut tinggal di ambil kembali.

- Selain pemberkasan yang rapi data-data yang ada juga dilakukan digitalisasi/mapping sehingga lokasi data-data tersebut dapat diketahui lokasinya.
 - Pihak-pihak terkait penyelesaian konflik pertanahan diwilayah kooperarif dalam mendukung penyelesaian konflik.
 - Updating terhadap peraturan perundang undangan terkait pertanahan.
 - Tersedianya pagu anggaran yang mendukung tercapainya tupoksi dari bidang pertanahan.
- c. **Faktor penghambat Capaian Indikator** Persentase Penyelesaian Permasalahan Pertanahan per Tahun adalah sebagai berikut:
- Pihak yang termasuk dalam indikasi tidak kooperarif dalam penyelesaian permasalahan pertanahan.
 - Kurangnya fasilitas pendukung.
 - Minimnya koordinasi ke tingkat pusat.
- d. **Tindak lanjut Capaian Indikator** Persentase Penyelesaian Permasalahan Pertanahan per Tahun adalah sebagai berikut:
- Mengupayakan koordinasi ke tingkat pusat.
 - Memaksimalkan pendataan yang lebih baik.
 - Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada.

3.6 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan taupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3-5

Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

No.	Tujuan	IKU		Sasaran Program	indikator Program	Nama Program	Target Kinerja	Capaian Kinerja	Satuan	anggaran (Rp)	realisasi (Rp)	capaian anggaran (%)
		Sasaran	Indikator									
1	Meningkatkan Pelayanan Infrastruktur Dasar Bidang Pekerjaan Umum (Sektor Cipta Karya)		Tingkat Pelayanan infrastruktur Dasar Bidang Sektor Cipta Karya									
		Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Persentase Penduduk yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	100	82,4	%	1.955.048.000	842.196.754	48,89%
		Terbangunnya Infrastruktur Persampahan Kota Dumai	Persentase Infrastruktur Persampahan	Terlaksananya Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase Pengembangan Sistem dan pengelolaan Persampahan Regional	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	42,59	117,4	%	-	-	-
		Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	Persentase Penduduk Berakses air minum	Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Penyediaan Sistem Air Minum	Persentase Penduduk Terlayani SPAM Jaringan Perpipaan	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	100	15,38	%	41.931.295.447	23.921.609.378	59,75%
		Terselenggaranya Bangunan Gedung dan Sarana untuk Kepentingan Strategis Perkotaan	Persentase bangunan gedung dan sarana strategis kota yang di selenggarakan	Terlaksananya Penataan Bangunan Gedung	Persentase Peningkatan Penataan Bangunan Gedung	Program Penataan Bangunan Gedung	45	100	%	112.704.319.220	54.110.448.067	48,58%
				Terlaksananya Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase Penataan Bangunan dan lingkungan	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya				400.000.000	16.920.000	4,23%
		Terbangunnya TPA/TPST/TPS3R/TPS Kota Dumai	Persentase terbangunnya TPA/TPST/TPS3R/TPS Kota dumai	Terlaksananya Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase Pengembangan Sistem dan pengelolaan Persampahan Regional	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	-	-	%	-	-	-
2	Mewujudkan Tata Ruang yang sesuai dengan pemanfaatan ruang		Persentase Kesesuaian Tata Ruang									
		Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Peruntukannya	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Dengan Peruntukannya	Terlaksananya Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Penataan Ruang	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	50,26	100	%	2.461.191.200	153.107.694	47,13%
3	Menyelesaikan Permasalahan Pertanahan per Tahun		Persentase Penyelesaian Permasalahan pertanahan per tahun									
		Tercapainya Tertib Tata Kelola Bidang Pertanahan yang Baik	Penyelesaian kasus tanah Pemerintah, Pemda dan Masyarakat	Terlaksananya Penatagunaan Tanah	Persentase Penatagunaan Tanah	Program Penatagunaan Tanah	60	120	%	400.000.000	186.071.488	46,94%
				Terlaksananya Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan				241.000.000	159.071.538	66,00%

3.7 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Adapun analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3-6
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran
1	Penyediaan Pelayanan Peengolahan Air Limbah Domestik	Persentase penduduk yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik berakses sanitasi	82,40%	48,89%
2	Terbangunnya Infrastruktur persampahan Kota Dumai	Persentase Infrastruktur Persampahan	117,40%	0
3	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Persentase penduduk berakses air minum	15,38%	59,75%
4	Terselenggaranya bangunan gedung dan sarana untuk kepentingan strategis perkotaan	Persentase bangunan gedung dan sarana strategis kota yang di selenggarakan	100%	48,42%
5	Terbangunnya TPA/TPST/TPS3R/TPS Kota Dumai	Persentase terbangunnya TPA/TPST/TPS3R/TPS Kota Dumai	0	0
6	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan dengan peruntukannya	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan peruntukannya	100%	47,13%
7	Tercapainya tertib tatakelola bidang pertanahan yang baik	Persentase penyelesaian permasalahan	120%	54,11%

Berdasarkan table diatas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut::

- a. Pada Indikator Kinerja Utama Persentase penduduk yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik berakses sanitasi tingkat efisiensinya adalah 1,68% berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2024 (82,40%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2024 (48,89%). Pencapaian tersebut menunjukkan

bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori **EFISIEN**;

- b. Pada Indikator Kinerja Utama Persentase Infrastruktur Persampahan Kota Dumai tingkat efisiensinya adalah 0% berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2024 (0%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2024 (117,40%). Pencapaian tersebut didapat dalam hitungan akumulasi dari tahun sebelumnya menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori **SANGAT**;
- c. Pada Indikator Kinerja Utama yaitu Persentase Penduduk Berakses Air Minum tingkat efisiensinya adalah 0,26% berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2024 (15,38%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2024 (59,75%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori **KURANG**;
- d. Pada Indikator Kinerja Utama Persentase Bangunan Gedung dan Sarana Strategis Kota yang Diselenggarakan tingkat efisiensinya adalah 2,06% berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2024 (100%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2024 (48,42%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori **SANGAT**;
- e. Pada Indikator Kinerja Utama Persentase terbangunnya TPA/TPST/STA/TPS3R/TPS Kota Dumai tingkat efisiensinya adalah 0% berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2024 (0%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 4(0%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori **KURANG**;
- f. Pada Indikator Kinerja Utama Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Peruntukannya tingkat efisiensinya adalah 2,12% berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2024 (100%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2024 (47,13%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori **SANGAT**;
- g. Pada Indikator Kinerja Utama Persentase penyelesaian permasalahan

pertanahan per tahun tingkat efisiensinya adalah 3,08% berasal dari perhitungan persentase capaian kinerja tahun 2024 (120%) dibagi dengan persentase penyerapan anggaran tahun 2024 (54,11%). Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan Sumber Daya termasuk dalam kategori **SANGAT**;

9.8 Prestasi dan Penghargaan

Pada tahun 2024 Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai tidak terdapat penghargaan.

Tabel 3-7

Prestasi dan Penghargaan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai Tahun 2024

No	Jenis Penghargaan	Prestasi	Tingkat	Diberikan Oleh
1	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2				
3				
4				

B. REALISASI ANGGARAN

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang tercantum pada perjanjian kinerja perubahan tahun 2024. Adapun Anggaran per Sasaran tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 3-8

Ringkasan Anggaran dan realisasi Tahun 2024

No	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan		Anggaran	Realisasi	%
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA		9.753.759.324	7.887.506.321	77,57
	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	88.077.100	31.758.000	36,06
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	35.486.400	14.405.100	40,59
		2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.886.800	5.737.900	97,47

	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	8.868.600	2.700.000	30,44
	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.735.100	2.855.000	49,78
	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	8.482.600	2.020.000	23,81
	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13.803.700	4.040.000	29,27
	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.813.900	-	-
2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.403.041.580	6.247.787.281	
	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.394.556.480	6.247.787.281	94,50
	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8.485.100	-	-
3		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	23.356.500	-	
	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	7.390.300		
	2	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	7.980.000		
	3	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	7.986.200		
4		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-
	1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-
5		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.000.152.488	680.363.715	68,03
	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-
	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	203.582.948	22.806.100	11,20
	3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.646.040	14.269.300	55,64
	4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	44.537.500	11.525.700	25,88
	5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.940.000	-	-
	6	Penyediaan Bahan/Material	-	-	-
	7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	701.946.000	620.512.615	88,40
	8	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	14.500.000	11.250.000	77,59

	6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		1.039.337.560	120.310.000	11,58
		1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-
		2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-
		3	Pengadaan Alat Besar	-	-	-
		4	Pengadaan Mebel	470.308.900	-	-
		5	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	569.028.660	120.310.000	21,14
		6	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-
	7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		775.600.300	691.231.325	89,12
		1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-
		2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-
		3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	775.600.300	691.231.325	89,12
	8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		424.193.796	121.056.000	28,54
		1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-
		2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	221.723.760	121.056.000	54,60
		3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	-	-	-
		4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	202.470.036	-	-
		5	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			41.931.295.447	25.053.577.487,67	59,74

	1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	41.931.295.447	25.053.577.487,67	57,05
	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	794.253.235	442.156.260	55,67
	2	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	1.279.960.000	573.592.900	44,81
	3	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	37.101.760.178	24.018.508.327,67	64,74
	4	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	2.755.322.034	19.320.000	0,70
3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		1.955.048.000	955.868.754	48,89
	1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.955.048.000	955.868.754	48,89
	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	222.623.000	70.059.598	31,47
	2	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	450.080.000	415.850.000	92,39
	3	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	314.109.400	156.541.400	49,84
	4	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	308.575.600	121.417.756	39,35
	5	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	659.660.000	192.000.000	29,11
4	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG		112.704.319.220	54.751.995.861,85	48,58
	1	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	112.704.319.220	54.751.995.861,85	48,58

		1	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	409.200.000	311.700.000	76,17
		2	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	92.474.794.717	45.626.965.267,36	49,34
		3	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	19.820.324.503	8.813.330.594,49	44,47
5	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA			400.000.000	16.920.000	4,23
	1	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota		400.000.000	16.920.000	4,23
		1	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	400.000.000	16.920.000	4,23
		2	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	-	-	-
6	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG			2.461.191.200	1.159.957.918,07	47,13
	1	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota		845.090.100	153.107.693,55	18,12
		1	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota	500.000.000	148.607.693,55	29,72
		2	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	244.071.200	4.500.000	1,84

			Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang	101.018.900	-	-
	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota		800.000.000	474.097.907,52	59,26
		1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	800.000.000	474.097.907,52	59,26
	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		253.268.400	158.195.050	62,46
		1	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	253.268.400	158.195.050	62,46
	4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		562.832.700	374.557.267	66,55
		1	Pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiscal	77.831.100	51.576.640	66,27
		2	Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat	100.018.500	56.685.695	56,68
		3	Pengawasan kinerja pemenuhan standar teknis kawasan	-	-	-
		4	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	384.983.100	266.294.932	69,17
	7	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL		-	-	-
		1	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-
		1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	-	-	-
		2	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	-	-	-
		3	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	-	-	-
	8	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN		241.000.000	159.071.538	66,00
		1	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	241.000.000	159.071.538	66,00
		1	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000	58.157.000	58,16

			Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah			
		2	Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	141.000.000	100.914.538	71,57
9	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH			400.000.000	187.071.488	46,52
	1	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota		400.000.000	187.751.488	46,94
		1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	400.000.000	187.751.488	46,94

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2024 merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai. LKIP juga disusun karena perannya sebagai alat kendali, penilai kualitas kerja dan sebagai pendorong pewujudan *Good Governance*. Dilain pihak, LKIP juga merupakan media pertanggungjawaban kepada publik yang dapat digunakan sebagai alat intropeksi dan refleksi terhadap pelaksanaan tugas dan tanggungjawab.

Permasalahan dan Saran Solusi

1. Pada Persentase Penduduk Berakses Air Minum permasalahan yang dihadapi adalah Jaringan perpipaan yang belum merata, Terbatasnya jumlah unit SR dan Kemampuan keuangan yang terbatas. Adapun saran dan solusinya adalah melakukan perluasan jaringan perpipaan dan memberikan bantuan subsidi unit SR kepada masyarakat berpenghasilan rendah.
2. Pada Persentase Penduduk yang Berakses Sanitasi permasalahan yang dihadapi adalah Kemampuan keuangan yang terbatas dan belum tepatnya sasaran. Adapun saran dan solusinya adalah penganggaran sesuai kebutuhan, Penyusunan program penangan area berisiko dengan pembangunan Sanitasi dan mempunyai daftar calon penerima manfaat sesuai dengan BNBA yang tepat sasaran.
3. Pada Persentase Bangunan Gedung dan Sarana Strategis Kota yang Diselenggrakan permasalahan yang dihadapi masih kurangnya partisipasi Masyarakat dan kebanyakan material tidak di datangkan dari luar Dumai. Adapun saran dan solusinya adalah melakukan sosialisasi pada masyarakat terkait bangunan gedung dan melakukan inventarisasi kembali kebutuhan gedung dan sarana strategis.

4. Pada Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Peruntukannya permasalahan yang dihadapi adalah website gistaru.atrbpn.go.id dan Online Single Submission (OSS) masih dalam tahap pengembangan sehingga tidak dapat diakses dalam waktu tertentu, sehingga masyarakat tidak dapat mengetahui informasi tata ruang. Adapun saran dan solusinya adalah Bidang Tata Ruang sedang menyusun website SIPETARUNG untuk informasi penataan ruang dan kemudahan perizinan bagi Masyarakat yang berinvestasi di Kota Dumai, Mengoptimalkan fungsi Forum Penataan Ruang (FPR) terkait penyelesaian dan permasalahan pemanfaatan ruang dan menyelesaikan Rencana Detail Tata Ruang se-Kota Dumai untuk kemudahan dan percepatan alur perizinan.
5. Pada Persentase terbangunnya TPA/TPST/STA/TPS3R/TPS Kota Dumai permasalahan yang dihadapi tidak tersedianya anggaran pembangunan infrastruktur persampahan. Adapun saran dan solusinya adalah menganggarkan sesuai dengan kebutuhan.
6. Pada Persentase Penyelesaian Permasalahan Pertanahan per Tahun permasalahan yang dihadapi adalah pihak yang termasuk dalam indikasi tidak kooperatif dalam penyelesaian permasalahan pertanahan, Kurangnya fasilitas pendukung dan minimnya koordinasi ke tingkat pusat.

Demikian beberapa hal yang dapat Kami sampaikan dalam LKIP Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai Tahun 2024. Semoga dapat memberikan gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridhoi dan memberikan petunjuk, sehingga kita senantiasa memiliki kekuatan dan kemampuan yang tulus dan ikhlas dalam-sama membangun Kota Dumai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Daerah menuju peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Dumai, 14 Januari 2025
Kepala Dinas Pertanahan dan
Penataan Ruang Kota Dumai

MUHAMMAD MUFARIZAL, S.T., M.IP.
Pembina / IV a
NIP.19860216 201001 1 014

L

A

M

P

I

R

A

N

MATRIK RENCANA STRATEGIS
DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG KOTA DUMAI
TAHUN 2021-2026

TUJUAN									SASARAN								CARA MENCAIPI TUJUAN DAN SASARAN			KETERANGAN	
URAIAN	INDIKATOR	FORMULA PERHITUNGAN	KONDIS	TARGET (%)					URAIAN	INDIKATOR	FORMULA PERHITUNGAN	KONDIS	TARGET					STRATEGI	KEBIJAKAN		PROGRAM
				2021	2022	2023	2024	2025					2026	2021	2022	2023	2024				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Meningkatkan Pelayanan Infrastruktur Dasar Bidang Pertanahan dan Penataan Ruang	Tingkat Pelayanan Infrastruktur Dasar Sektor Cipta Karya	Peta Peta dari Nilai Indikator Pementaan Penduduk barang air Minum	40,51	68,47	70,44	71,9	73,22	74,31	Pemenuhan Kebutuhan Pokok air Minum Sehari-hari	Persentase Penduduk Berakses air minum	Jumlah Jaringan Perpipan(JP) + Jumlah Bukan jaringan Perpipaan(BJP) X 100% Jumlah Penduduk Kota Dumai	29,53	100	100	100	100	100	Peningkatan kinerja sistem penyediaan air bersih Kota Dumai	Mengoptimalkan distribusi air bersih secara merata	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	
									Terbangunnya infrastruktur persampahan Kota Dumai	Persentase Infrastruktur Persampahan	Jumlah Penyelenggaraan Infrastruktur Persampahan x100% Jumlah Kebutuhan Infrastruktur Persampahan	38,89	38,89	40,74	42,59	45,37	47,22			Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan	
									Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Persentase Penduduk yang Berakses Sanitasi	Jumlah KK Terlayani x 100 % Total Jumlah KK Kota Dumai		100	100	100	100	100	Meningkatkan kualitas sanitasi perumahan dan permukiman	Mengoptimalkan cakupan pelayanan persampahan, air bersih dan air limbah domestik	Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik	
									Terseleenggaranya bangunan gedung dan sarana untuk kepentingan strategis perkotaan	Persentase bangunan gedung dan sarana strategis kota yang di selenggarakan	Jumlah Bangunan Gedung yang Tersedia + Jumlah Bangunan Gedung Yang Dibangun Jumlah Kebutuhan bangunan Gedung Kota Dumai	60,24	35,00	41,00	45,00	47,50	50,00	Pemenuhan kebutuhan bangunan Gedung strategis Kota Dumai	Meningkatkan Kualitas Pembangunan Gedung Strategis Kota Dumai	Program penataan bangunan gedung	Program penataan bangunan dan lingkungannya
								Terbangunnya infrastruktur persampahan Kota Dumai	Persentase terbangunnya TPA/TPST/TPS3R/TPS Kota Dumai	Jumlah Penyelenggaraan Infrastruktur Persampahan x100% Jumlah Kebutuhan Infrastruktur Persampahan	93,00	93,00	0	0	0	0			Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan		
Tervujudnya Tata Ruang yang sesuai dengan pemanfaatan ruang	Persentase Kesesuaian Tata Ruang	Luasan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang x100% Luasan Wilayah Rencana Tata Ruang (RTR)	0,25	47,53	48,46	50,26	52,49	56,49	Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan dengan Peruntukannya	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Dengan Peruntukannya	Luas Kesesuaian Pemanfaatan Ruang x100% Luas Peruntukan Pemanfaatan Ruang	0,25	47,53	48,46	50,26	52,94	56,49	Mewujudkan tata ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan	Memanfaatkan ruang secara bijaksana/Menjaga konsistensi pola penataan ruang sesuai dengan RTRW	Program penyelenggaraan penataan ruang	
Penyelesaian Permasalahan Pertanahan Per tahun	Persentase Penyelesaian Permasalahan pertanahan	-	20	20	40	60	80	100	Tercepaainya tertib tatakelola bidang pertanahan yang baik	Persentase Penyelesaian Permasalahan pertanahan per tahun	Jumlah Kasus yang diselesaikan Jumlah Kasus yang terdaftar	20	20	40	60	80	100			Program penyelesaian sengketa tanah garapan	Program penatagunaan tanah

Dumai, 14 Januari 2025
KEPALA DINAS PERTANAHAN DAN
PENTAN RUANG KOTA DUMAI

MUHAMMAD MUFARIZAL, ST., M.I.P.
Pembina/ IV a
NIP. 19860216 201001 1 014

RENCANA KINERJA TAHUN 2024

DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG KOTA DUMAI

KINERJA UTAMA			PROGRAM			KEGIATAN/ SUB. KEGIATAN			ANGGARAN						
URAIAN	INDIKATOR	TARGET	URAIAN	INDIKATOR	TARGET	URAIAN	INDIKATOR	TARGET							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
Pemenuhan Kebutuhan Pokok air Minum Sehari-hari	Persentase Penduduk Berakses Air Minum	100	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Persentase Penduduk Terlayani SPAM Jaringan Perpipaan	11,79	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SR Pengelolaan dan Pengembangan SPAM Jaringan Perpipaan	4000	Rp 41.931.295.447,00						
						Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun	400 Unit	Rp 1.279.960.000,00						
						Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	5 Dokumen	Rp 794.253.235,00						
						Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara	13 Unit	Rp 2.755.322.034,00						
						Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	5000 SR	Rp 37.101.760.178,00						
Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Persentase Penduduk yang Berakses Sanitasi	100	Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	100	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	188 Rumah Tangga	Rp 1.955.048.000,00						
						Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	1000 Rumah Tangga	Rp 308.575.600,00						
						Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	1 Unit	Rp 659.660.000,00						
						Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	2 Unit	Rp 314.109.400,00						
						Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat		10 Rumah Tangga	Rp 450.080.000,00						
						Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	1 Dokumen	Rp 222.623.000,00						
Terselenggaranya bangunan gedung dan sarana untuk kepentingan strategis perkotaan	Persentase bangunan gedung dan sarana strategis kota yang diselenggarakan	45,00	Program penataan bangunan gedung	Persentase Peningkatan Penataan Bangunan Gedung	20%	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	10 Kegiatan	Rp 112.704.319.220,00						
						Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	10 Bangunan Gedung	Rp 19.820.324.503,00						
						Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	6 Dokumen	Rp 92.474.794.717,00						
						Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	1 Dokumen	Rp 409.200.000,00						
			Program penataan bangunan dan lingkungannya	Persentase Penataan Bangunan dan lingkungan	71,43	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	5 Lokasi	Rp 400.000.000,00						
						Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	1 Kawasan	Rp -						
						Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Rp 400.000.000,00						

Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Dengan Peruntukannya	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Dengan Peruntukannya	50,26	Program penyelenggaraan penataan ruang	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Penataan Ruang	62,49	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	2 Dokumen	Rp 845.090.100,00
						Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Rp 500.000.000,00
						Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Rp 244.071.200,00
						Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	2 Orang	Rp 101.018.900,00
						Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Rp 800.000.000,00
						Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	2 Dokumen	Rp 800.000.000,00
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	8 Dokumen	Rp 253.268.400,00
						Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	1 Dokumen	Rp 253.268.400,00
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	4 Dokumen	Rp 562.832.700,00
						Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1 Dokumen	Rp 384.963.100,00
						Pengawasan kinerja pemenuhan standar teknis kawasan	Dokumen hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Teknis Kawasan	1 Dokumen	Rp -
						Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat	Dokumen hasil Penilaian kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat	1 Dokumen	Rp 100.018.500,00
						Peremberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal	Jumlah berita acara pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal	1 Berita Acara	Rp 77.831.100,00
Terbangunnya infrastruktur persampahan kota dumai	Persentase terbangunnya TPA/TPST/TPS3 R/TPS Kota dumai	0	Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	Persentase Pengembangan Sistem dan pengelolaan Persampahan Regional	0	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	0 Unit	Rp -
						Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun	0 Rumah Tangga	Rp -
						Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	0 Ton/hari	Rp -
						Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun	0 Dokumen	Rp -
Tercapainya tertib tatakelola bidang pertanahan yang baik	Persentase Penyelesaian Permasalahan pertanahan pertahun	60	Program penyelesaian sengketa tanah garapan	Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	60	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen/Laporan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	Rp 241.000.000,00
						Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Rp 100.000.000,00
						Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	Rp 141.000.000,00
				60	Program penatagunaan tanah	Persentase Penatagunaan Tanah	60	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen/Laporan Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota
						Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	3 Laporan	Rp 400.000.000,00

Dumai, 14 Januari 2025
KEPALA DINAS PERTANAHAN DAN
PENTAAN RUANG KOTA DUMAI

MUHAMMAD MUFARIZAL, ST., M.P.
Pembina/ IV a
NIP. 19860216 201001 1 014



PERJANJIAN KINERJA DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG KOTA DUMAI TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **MUHAMMAD MUFARIZAL,S,T.M.IP**

Jabatan : **KEPALA DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG KOTA DUMAI**

Selanjutnya disebut ***Pihak Pertama***

Nama : **H. PAISAL, SKM, MARS**

Jabatan : **WALI KOTA DUMAI**

Selaku atasan langsung ***Pihak Pertama***

Selanjutnya disebut ***Pihak Kedua***

Pihak Pertama pada Tahun 2024 berjanji akan mewujudkan Target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai Target Kinerja Jangka Menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian Target Kinerja tersebut menjadi tanggung jawab ***Pihak Pertama***.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 1 Februari 2024

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

H. PAISAL, SKM, MARS


MUHAMMAD MUFARIZAL,S,T.M.IP
NIP. 198602162010011014

**PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG KOTA DUMAI
TAHUN 2024**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target
(1)	(2)	(3)	(5)
1	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Persentase penduduk berakses air minum	100,00
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah Domestik	Persentase penduduk yang memperoleh layanan pengolahan air limbah Domestik	100,00
3	Terselenggaranya bangunan gedung dan sarana untuk kepentingan strategis perkotaan	Persentase bangunan gedung dan sarana strategis kota yang diselenggarakan	45,00
4	Peningkatan kesesuaian pemanfaatan ruang dengan peruntukannya	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan peruntukannya	50,26
5	Terbangunnya infrastruktur persampahan kota dumai	Persentase terbangunnya TPA/TPST/STA/TPS3R/TPS Kota Dumai	42,59
6	Tercapainya tertib tata kelola bidang pertanahan yang baik	Persentase penyelesaian permasalahan pertanahan pertahun	60

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	27.584.000.050	
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	2.945.663.000	
3	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	80.112.254.189	
4	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	400.000.000	
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	2.288.000.000	
6	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	200.000.000	
7	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	400.000.000	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		





**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG KOTA DUMAI TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **MUHAMMAD MUFARIZAL, S.T., M.I.P.**

Jabatan : **KEPALA DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG KOTA DUMAI.**

Selanjutnya disebut ***Pihak Pertama***

Nama : **H. PAISAL, SKM, MARS.**

Jabatan : **WALI KOTA DUMAI.**

Selaku atasan langsung ***Pihak Pertama***, Selanjutnya disebut ***Pihak Kedua***

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai 23 September 2024

PIHAK KEDUA



H. PAISAL, SKM., MARS

PIHAK PERTAMA



MUHAMMAD MUFARIZAL, S.T., M.I.P.
NIR. 19860216 201001 1 014

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG KOTA DUMAI TAHUN 2024**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target
1	Penyediaan kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	Persentase Penduduk Berakses Air Minum	100%
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Penduduk Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	100%
3	Terselenggaranya Bangunan Gedung Dan Sarana Untuk Kepentingan Strategis Perkotaan	Presentase Bangunan Gedung Dan Sarana Strategis Kota Yang Diselenggarakan	45%
4	Peningkatan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Dengan Peruntukannya	Presentase kesesuaian Pemanfaatan Ruang Dengan Peruntukannya	50,26%
5	Terbangunnya Infrastruktur Persampahan Kota Dumai	Presentase Terbangunnya TPA/TPST/STA/TPS3R/TPS Kota Dumai	42,59%
6	Tercapainya Tertib Kelola Bidang Pertanahan yang Baik	Presentase Penyelesaian Permasalahan Pertanahan Pertahun	60%

1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9,753,759,324
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	41,931,295,447
3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1,955,048,000
4	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	112,704,319,220
5	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	400,000,000
6	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	2,461,191,200
7	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	241,000,000
8	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	400,000,000
JUMLAH		169,846,613,191.00

Dumai 23 September 2024


PIHAK KEDUA
H. PAISAL, SKM, MARS


PIHAK PERTAMA
MUHAMMAD MUEARIZAL, ST., M.IP
NIP. 19860216 201001 1 014

PENGUKUR KINERJA

Nama OPD : Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Dumai
 Tahun Anggaran : 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Target (%)	Realisasi	Capaian
1		Tingkat Pelayanan infrastruktur Dasar Bidang Sektor Cipta Karya	Peta dari Nilai Indikator Pemetaan Penduduk Barang Air Minum	71,90	48,20	67,03
	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Persentase Penduduk yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah KK Terlayani x 100 %/ Total Jumlah KK Kota Dumai	100	82,40	82,40
	Terbangunnya Infrastruktur persampahan Kota Dumai	Persentase Infrastruktur Persampahan	Jumlah Penyelenggaraan Infrastruktur Persampahan x100%/ Jumlah Kebutuhan Infrastruktur Persampahan	42,59	50	117,4
	Pemenuhan Kebutuhan Pokok air Minum Sehari-hari	Persentase Penduduk Berakses air minum	Jumlah Jaringan Perpipan(JP) + Jumlah Bukan jaringan Perpipaan(BJP) X 100%/ Jumlah Penduduk Kota Dumai	100	15,38	15,38
	Terselenggaranya bangunan gedung dan sarana untuk kepentingan strategis perkotaan	Persentase bangunan gedung dan sarana strategis kota yang di selenggarakan	Jumlah Bangunan Gedung yang Tersedia + Jumlah Bangunan Gedung Yang Dibangun/ Jumlah Kebutuhan bangunan Gedung Kota Dumai	45,00	45,00	100
	Terbangunnya TPA/TPST/TPS3R/TPS Kota Dumai	Persentase terbangunnya TPA/TPST/TPS3R/TPS Kota Dumai	Jumlah Penyelenggaraan Infrastruktur Persampahan x100%/ Jumlah Kebutuhan Infrastruktur Persampahan	0	0	0
2		Persentase Kesesuaian Tata Ruang	Luas Kesesuaian Pemanfaatan Ruang x100%/ Luas Peruntukan Pemanfaatan Ruang	50,26	50,26	100
	Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan dengan Peruntukannya	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Dengan Peruntukannya	Luas Kesesuaian Pemanfaatan Ruang x100%/ Luas Peruntukan Pemanfaatan Ruang	50,26	50,26	100
3		Persentase Penyelesaian Permasalahan pertanahan pertahun	Jumlah Kasus yang diselesaikan/ Jumlah Kasus yang terdaftarx100%	60	72	120
	Tercapainya tertib tatakelola bidang pertanahan yang baik	Penyelesaian kasus tanah Pemerintah, Pemda dan Masyarakat	Jumlah+A13:E17 Kasus yang diselesaikan/ Jumlah Kasus yang terdaftarx100%	60	72	120
	Pagu Anggaran Tahun 2024	169.846.613.191,00				
	Realisasi Anggaran Tahun 2024	90.172.649.368,59				
	Persentase Capaian Tahun 2024	53,09				

Dumai, 14 Januari 2025
 KEPALA DINAS PERTANAHAN DAN
 PENTAAAN RUANG KOTA DUMAI

MUHAMMAD MUFARIZAL, ST., M.IP.
 Pembina/ IV a
 NIP. 19860216 201001 1 014

Program, Kegiatan, Sub. Kegiatan dan Realisasi Belanja Tahun 2024
Dinas Pertanahan Dan Penataan Ruang Kota Dumai

No	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.753.759.324	7.887.506.321	80,87
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	88.077.100	31.758.000	36,06
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	35.486.400	14.405.100	40,59
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.886.800	5.737.900	97,47
1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	8.868.600	2.700.000	30,44
1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.735.100	2.855.000	49,78
1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	8.482.600	2.020.000	23,81
1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13.803.700	4.040.000	29,27
1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.813.900	-	-
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.403.041.580	6.242.787.281	97,50
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.394.556.480	6.242.787.281	97,63
2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8.485.100	-	-
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	23.356.500	-	-
3.1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	7.390.300	-	-
3.2	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	7.980.000	-	-
3.3	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	7.986.200	-	-
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-
4.1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.000.152.488	680.363.715	68,03
5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-
5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	203.582.948	22.806.100	11,20
5.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.646.040	14.269.300	55,64
5.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	44.537.500	11.525.700	25,88
5.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.940.000	-	-
5.6	Penyediaan Bahan/Material	-	-	-
5.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	701.946.000	620.512.615	88,40
5.8	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	14.500.000	11.250.000	77,59
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.039.337.560	120.310.000	11,58
6.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-
6.2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-
6.3	Pengadaan Alat Besar	-	-	-
6.4	Pengadaan Mebel	470.308.900	-	-
6.5	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	569.028.660	120.310.000	21,14
6.6	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	775.600.300	691.231.325	89,12211
7.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-
7.2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-
7.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	775.600.300	691.231.325	89,12
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	424.193.796	121.056.000	28,54
8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-
8.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	221.723.760	121.056.000	54,60
8.3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	-	-	-
8.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	202.470.036	-	-
8.5	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-

II	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	41.931.295.447	25.053.577.487,67	59,75
1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	41.931.295.447	25.053.577.487,67	59,75
1.1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	794.253.235	442.156.260	55,67
1.2	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	1.279.960.000	573.592.900	44,81
1.3	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	37.101.760.178	24.018.508.327,67	64,74
1.4	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	2.755.322.034	19.320.000	0,70
III	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1.955.048.000	955.868.754	48,89
1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.955.048.000	955.868.754	48,89
1.1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	222.623.000	70.059.598	31,47
1.2	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	450.080.000	415.850.000	92,39
1.3	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	314.109.400	156.541.400	49,84
1.4	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	308.575.600	121.417.756	39,35
1.5	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	659.660.000	192.000.000	29,11
IV	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	112.704.319.220	54.751.995.861,85	48,58
1	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	112.704.319.220	54.751.995.861,85	48,58
1.1	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	409.200.000	311.700.000	76,17
1.2	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	92.474.794.717	45.626.965.267,36	49,34
1.3	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	19.820.324.503	8.813.330.594,49	44,47
V	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	400.000.000	16.920.000	4,23
1	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	400.000.000	16.920.000	4,23
1.1	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	400.000.000	16.920.000	4,23
1.3	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	-	-	-
VI	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	2.461.191.200	1.159.957.918,07	47,13
1	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	845.090.100	153.107.693,55	18,12
1.1	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota	500.000.000	148.607.693,55	29,72
1.2	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	244.071.200	4.500.000	1,84
1.3	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang	101.018.900	-	-
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	800.000.000	474.097.907,52	59,26
2.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	800.000.000	474.097.907,52	59,26
3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	253.268.400	158.195.050	62,46
3.1	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	253.268.400	158.195.050	62,46
4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	562.832.700	374.557.267	66,55
4.1	Pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiscal	77.831.100	51.576.640	66,27
4.2	Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat	100.018.500	56.685.695	56,68
4.3	Pengawasan kinerja pemenuhan standar teknis kawasan	-	-	-
4.4	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	384.983.100	266.294.932	69,17

VII	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	-	-	-
1	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-
1.1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	-	-	-
1.2	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	-	-	-
1.3	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	-	-	-
VIII	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	241.000.000	159.071.538	66,00
1	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	241.000.000	159.071.538	66,00
1.1	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000	58.157.000	58,16
1.2	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	141.000.000	100.914.538	71,57
IX	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	400.000.000	187.751.488	46,94
1	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	400.000.000	187.751.488	46,94
1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	400.000.000	187.751.488	46,94

Dumai, 14 Januari 2025
KEPALA DINAS PERTANAHAN DAN
PENTAAAN RUANG KOTA DUMAI

MUHAMMAD MUFARIZAL, ST., M.IP.
Pembina/ IV a
NIP. 19860216 201001 1 014